



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2026 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2026;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BOGOR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2026.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapperida adalah Kepala Bapperida Kota Bogor.

BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan Renja Perangkat Daerah merupakan:
 - a. dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2026 yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
 - b. penjabaran dari RKPD Kota Bogor Tahun 2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat daerah dengan indikator kinerja yang terukur pada setiap rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan Penetapan Renja Perangkat Daerah adalah untuk:



- a. mewujudkan pencapaian target kinerja perangkat daerah yang mendukung visi dan misi daerah;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 3

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB IV PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Kota Bogor yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;



- b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap rencana kerja perangkat daerah;
- b. Kepala Bapperida menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;
- d. Kepala Bapperida menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD dan renja perangkat daerah tahun berikutnya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari Renja:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- p. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;



- q. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Pendidikan;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- v. Dinas Perhubungan;
- w. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- x. Dinas Sosial;
- y. Dinas Tenaga Kerja;
- z. Satuan Polisi Pamong Praja;
- aa. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- bb. Kecamatan Bogor Barat;
- cc. Kecamatan Bogor Selatan;
- dd. Kecamatan Bogor Tengah;
- ee. Kecamatan Bogor Timur;
- ff. Kecamatan Bogor Utara;
- gg. Kecamatan Tanah Sareal;
- hh. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
- ii. Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Agustus 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 24 Agustus 2025

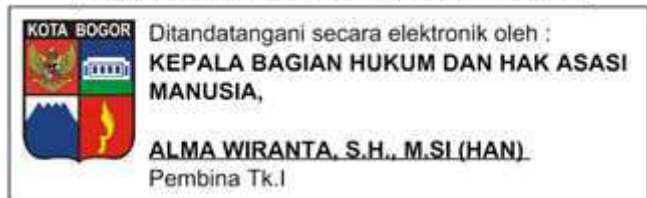
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

DENNY MULYADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

Nomor : 22 TAHUN 2025

Tanggal : 24 Agustus 2025

Tentang : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

BOGOR TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis Dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya

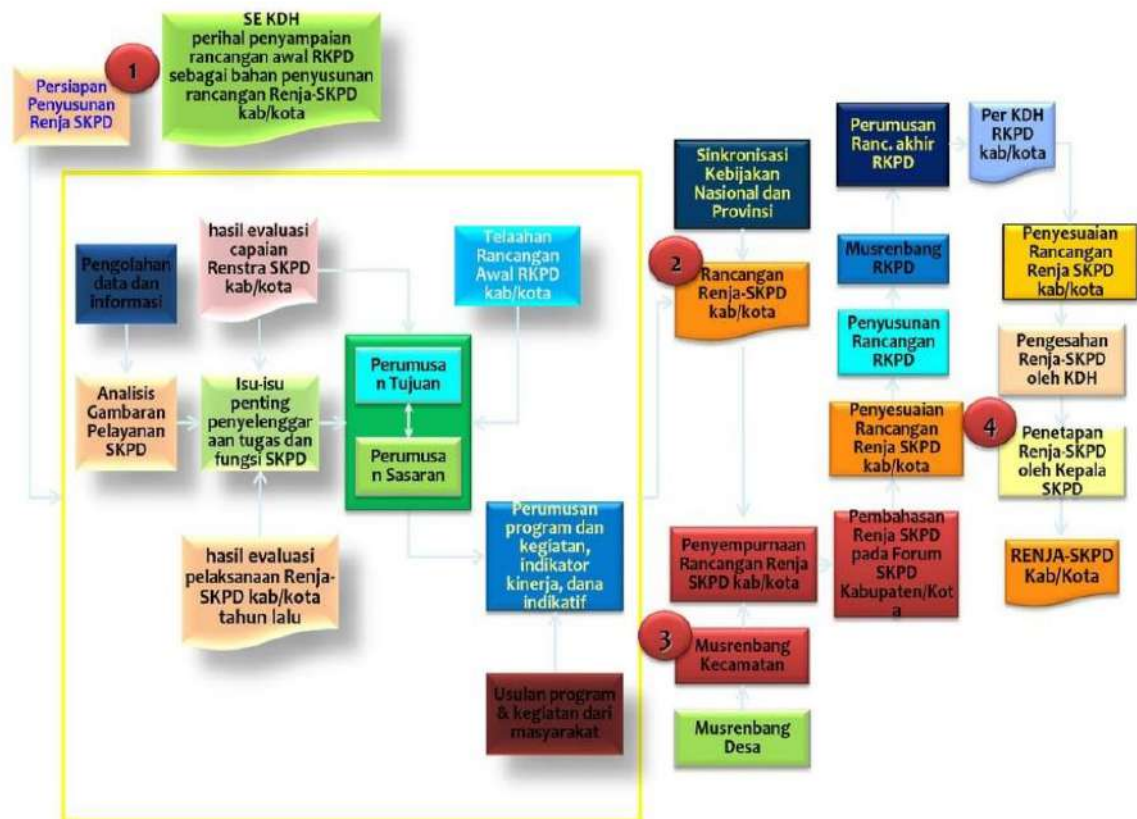
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 14 tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2025 sehingga perlu disusun Perubahan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2025 dan perlu disusun juga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2025.

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan sektor lingkungan hidup. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Kota Bogor no 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota No 162 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Program dan Kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang 3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, indikator kinerja program (outcome) , indikator kinerja kegiatan (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten / Kota



Rancangan Renja PD dibahas pada forum PD dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, pokok-pokok pikiran dewan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Renja PD ditetapkan melalui keputusan Walikota. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada RKPD Kota Bogor Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan;
- Penyusunan rancangan awal;

- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan Renja.

Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bogor.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor yang dibebani tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan daerah Kota Bogor di bidang Lingkungan Hidup, yang eksistensi dan kewenangannya dinyatakan secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, yang tertuang di dalam beberapa produk perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 48510)
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5059);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E)
11. Peraturan Walikota Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini adalah untuk memberi gambaran informasi Program, kegiatan-kegiatan serta rencana Anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada tahun 2026, baik Belanja Tidak Langsung maupun pelaksanaan Belanja Langsung.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana kerja ini adalah untuk :

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2026 yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat Kota Bogor;
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 yang berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2025 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Bogor Tahun 2023;
3. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.
4. Peningkatan kualitas perencanaan terhadap program dan kegiatan yang sistimatis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan antisipasi dampak perubahan iklim
5. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan,

pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, keterkaitan antara Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan dokumen RKPD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor serta ditindaklanjuti dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor serta susunan garis besar dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Lalu dan Capaian Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun lalu dan realisasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mengacu pada laporan kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan / atau realisasi APBD untuk Dinas yang bersangkutan.

Tabel yang perlu disajikan dalam bagian ini adalah tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor dan Pencapaian Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (tabel 1).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

- c. Dampaknya terhadap pencapaian RPJMD dan terhadap capaian program nasional seperti SPM.
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

- 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
- 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
- 4. Lampiran tabel berikut, Tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai :

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor tahun 2026 dan prakiraan maju (tahun $n+1$), sebagaimana tabel 2.

Bab IV. Penutup.

Berisikan uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BOGOR TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 serta Capaian Program sesuai dengan Renstra DLH Kota Bogor Tahun 2025-2026 mencakup 11 (sebelas) Program dengan sasaran dan indikator kinerja Sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Capaian Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	71.30	66.94	93.88
	Indeks Kualitas Air	55.63	67.63	121.57
	Indeks Tutupan Lahan	38.81	38.73	99.79
2. Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	0.3	0.3	100
3. Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah	4.17	6.78	162.58

DLH Kota Bogor tahun 2025, memiliki 11 program dengan anggaran sebesar Rp. 132.985.254.687 dengan realisasi sebesar Rp. 120.622.775.789 atau 90,70% dari anggaran.

Berikut adalah tabel capaian target dan realisasi anggaran DLH Kota Bogor tahun 2025.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan DLH Tahun Anggaran 2025

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			11.278.784.682	10.352.188.897	91,78
		Pengembangan Sistem dan		11.278.784.682	10.352.188.897	91,78

		Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS	289.039.600	251.067.390	86,86
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS	1.236.448.382	1.199.104.977	96,98
			Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS	255.658.900	238.390.610	93,25
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS	9.497.637.800	8.663.625.920	91,22
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			105.139.322.049	95.699.965.959	91,02
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		124.000.000	121.926.300	98,33
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.000.000	121.926.300	98,33
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33.724.763.784	31.967.822.703	94,79
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.614.843.784	31.857.902.703	94,77
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	109.920.000	109.920.000	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.065.098.390	977.304.714	91,75
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	459.272.000	452.907.800	98,61
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.952.800	74.471.425	91,99
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	329.840.000	278.352.000	84,39
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.539.590	63.455.910	91,25
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.494.000	108.117.579	86,15
		Penyediaan Jasa Penunjang		44.031.157.139	41.548.618.673	94,36

		Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	372.725.100	331.305.999	88,89
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.658.432.039	41.217.312.674	94,41
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		26.194.302.736	21.084.293.569	80,49
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.022.151.531	20.934.564.875	80,45
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.352.398	69.144.844	88,25
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.798.807	80.583.850	85,91
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			216.214.400	201.479.701	93,19
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		216.214.400	201.479.701	93,19
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	216.214.400	201.479.701	93,19
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			1.138.400.146	1.120.521.050	98,43
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1.038.845.730	1.025.394.050	98,70
			Koordinasi, Sinkronisasi dan	895.651.830	886.581.100	98,99

			Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	143.193.900	138.812.950	96,94
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		99.554.416	95.127.000	95,55
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	99.554.416	95.127.000	95,55
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			57.027.100	52.809.100	92,60
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		57.027.100	52.809.100	92,60
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	57.027.100	52.809.100	92,60
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			153.354.100	147.050.450	95,89
		Penyimpanan Sementara Limbah B3		153.354.100	147.050.450	95,89
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	153.354.100	147.050.450	95,89
7	Program			169.869.100	154.239.600	90,80

	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		169.869.100	154.239.600	90,80
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	169.869.100	154.239.600	90,80
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			1.408.801.330	1.286.158.539	91,30
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.408.801.330	1.286.158.539	91,30
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	4.536.960	3.856.800	85,01

			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup	947.885.170	852.677.396	89,96
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	456.379.200	429.624.343	94,14
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			494.366.900	489.232.600	98,96
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		494.366.900	489.232.600	98,96
			Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	494.366.900	489.232.600	98,96
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			29.878.200	24.610.600	82,37
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		29.878.200	24.610.600	82,37
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	29.878.200	24.610.600	82,37
11	Program Pengelolaan Persampahan			12.899.236.680	11.094.519.293	86,00
		Pengelolaan Sampah		12.899.236.680	11.094.519.293	86,00
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	9.024.509.800	7.676.554.911	85,06

			TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
			Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	1.025.635.800	783.507.082	76,39
			Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	2.849.091.080	2.634.457.300	92,47
JUMLAH				132.985.254.687	120.622.775.789	90,70

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program	Indikator	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
PROGRAM 2.11.06 : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	34	38	39	30	39	58	88.82	102.63	148.72
PROGRAM 2.11.10 : PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
PROGRAM : 2.11.03 : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	36.17	37.17	38.17	51.39	46.67	50.89	142.07	125.56	133.32
	Indeks Kualitas Udara	79.63	79.72	79.81	98.36	95.92	86.51	123.52	120.32	108.39
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7.11	7.72	7.98	7.98	7.72	8.22	112.23	100.00	103.01

PROGRAM 2.11.05 : PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	50	60	70	60	65	70	120	108.33	100.00
PROGRAM 2.11.03 : PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	30	40	50	31.49	50	52.48	104.97	125.00	104.96
PROGRAM 2.11.09 : PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Adiwiyata (%)	35	36	38	35.41	35.56	38	101.17	98.78	100.00
	Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan	7,94	9.26	10.59	16.8	18.98	22.18	211.58	204.97	209.44

PROGRAM 2.11.04 : PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	100	100.00	100.00
	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	77	77.5	78	81.35	79.08	81.4	105.65	102.04	104.36
	Persentase Reduksi Sampah	6,80	7	7.2	7.8	7.81	7.93	114.7	111.57	110.14
PROGRAM 1.03.04 : PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	100	100.00	100.00
	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS - 3R yang direhabilitasi	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	100	100.00	100.00
	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS - 3R yang ditingkatkan	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
	Persentase Sarana Persampahan yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00

PROGRAM 2.11.11 : PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Reduksi Sampah (%)	6,80	7	7.2	7.8	7.81	7.93	114.7	111.57	110.14
	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	77	77.5	78	81.35	79.08	81.4	105.65	102.04	104.36
	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48.8	48.8	48.8	48.8	48.8	73.75	100	100.00	151.13
	Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	2.1	2.1	2.1	2.1	2.9	2.96	100	138.10	140.95
	Indikator Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (nilai)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Nilai PMPRB di Lingkungan Perangkat daerah	81.01	81	82	NA	82.6	82	NA	101.98	100

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah	3.35	3.4	3.5	3.4	3.5	3.61	101.49	102.941	103.143
	Tujuan : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
	Sasaran : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00

PROGRAM 2.11.02 : PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------

Dari table 2.1 diatas dapat terlihat capaian realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025.

a. Faktor-faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan :



Penghitungan IKA dilakukan dengan pekerjaan Pengujian dan Analisa Kualitas Air Sungai dan Situ Musim Penghujan dan Pengujian dan Analisa Kualitas Air Sungai dan Situ Musim Kemarau. Pengujian air sungai dan situ musim penghujan dan musim kemarau dilakukan masing-masing di 30 titik sampling sungai dan 9 titik sampling situ. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional untuk Air Sungai dan Sejenisnya Kelas 2.

Penentuan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor Tahun 2025 ini dilakukan dengan metode Indeks pencemar atau IP dengan menggunakan 8 (delapan) parameter, yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nigrat, Total Fosfat dan Fecal Coliform (Permen LHK No. 27 Tahun 2021) dari lokasi hulu, Tengah dan hilir pada 10 (sepuluh) lokasi pemantauan (3 (tiga) sungai dan 7 (tujuh) anak sungai) di Kota Bogor. Nilai IP tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam IKA dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku kreteria mutu air Sungai Kelas II berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, nilai IKA-INA Situ Kota Bogor Tahun 2025 ini yaitu sebesar 69,93 atau masuk dalam kriteria Sedang. IKA-INA Situ ini merupakan nilai yang diperoleh dari pemantauan air situ yang ditentukan dari 8 parameter yaitu pH, BOD, COD, DO, TSS, Nitrat, Total Posfat dan Fecal Coliform.

Kemudian gabungan nilai IKA-INA Sungai dan Situ Tahun 2025 diperoleh sebesar 66,91 atau masuk dalam kriteria Sedang. Sedangkan nilai IKA-INA sementara gabungan dengan pemantauan oleh pemerintah pusat dihasilkan 66,94. Secara keseluruhan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebagian besar kualitas air Sungai dan Situ di Kota Bogor masih berada pada kategori Sedang hinga Baik. Nilai ini

meningkat dibandingkan dengan Tahun 2024 (data Musim Penghujan dan Musim Kemarau Kota Bogor) yaitu sebesar 49,74 atau masuk dalam kriteria Kurang, dan nilai IKA gabungan pemantauan dengan pemerintah pusat sebesar 50,89.

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Penghitungan IKU tahun 2025 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, selain ditambahkan parameter PM_{2,5}, juga ada perbedaan dalam cara penghitungannya dan berbeda pula baku mutu tahunannya.

Hasil penghitungan IKU Kota Bogor sebesar 74,82 termasuk kategori baik. Sedangkan hasil penghitungan gabungan dengan pemantauan oleh Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup, diperoleh nilai sementara sebesar 67,63 termasuk kategori sedang.

Limbah asap pabrik dan industri juga merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industri tersebut berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta dapat mengakibatkan pencemaran udara, air dan tanah. Selain itu, aktivitas rumah tangga juga memiliki andil yang tinggi dalam menyumbang pencemaran udara. Kegiatan rumah tangga tersebut seperti pembakaran sampah sembarangan.

Tahun 2025 pembinaan proklam dilakukan di 6 (enam) lokasi yaitu Kelurahan Cilendek Timur dan Cilender Barat Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan dan Kewlurahan Kedungjaya Kecamatan Tanah Sareal. Dari 6 (enam) lokasi binaan proklam hanya tiga yang di daftarkan ke SRN KLHK karena ketiga lokasi binaan ini sudah memenuhi kualifikasi dari Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan.



b. Faktor - faktor penghambat pemenuhan target kinerja program/kegiatan yaitu :

- Masih rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Terbatasnya luasan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan kan berlangsungnya proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
- Semakin meningkatnya jumlah usaha / kegiatan yang berpotensi mencemari / merusak lingkungan sehingga menjadi tantangan bagi Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor untuk pemantauan dan pengawasan LH.
- Terkait tantangan bidang persampahan, dimasa datang permasalahannya akan semakin berat dengan meningkatnya jumlah penduduk yang akan berdampak pada timbulan sampah, kualitas dan kuantitas alat angkut sampah yang belum optimal.

Adapun peluang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu adalah :

1. Adanya koordinasi antar OPD lain di tingkat daerah, provinsi maupun nasional;
2. Adanya dana DAK bidang LH atau Banku Provinsi Jawa Barat yang dapat mendorong kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor;
3. Kepedulian dan keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana corporate social Responsibility (CSR);
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5. Isu lingkungan merupakan isu global sehingga pelaku usaha dituntut untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Tabel 2.4. (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perubahan Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

NO					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	-				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun		0,01	0,01	0,01	100	4,17		
						Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi		0,02	0,02	0,02	100	2,13		
						Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang		100	100	100	100	98,16		

						ditingkatkan									
						Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi		100	100	100	100	100			
						Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	66.67								
1	03	04	201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	98.62	100	100	100	100	100			
1	03	04	201	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		3320	3850	3300	85,71				
						Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun						541,76 Ton			
1	03	04	201	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi		20	10	10	100				
					Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	40					10			
1	03	04	201	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		337658	337658	321580	95,23				
						Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	557					546,50 Ton/hari			
1	03	04	201	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan		200	150	145	96,67	130			
					Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	1240								

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	100	100	100	100	1		
2	11	02	201		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100	100	100	1		
2	11	02	201	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		1	1	1	100	1		
						Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	1							
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	1	1	1	1		
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	0							
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air		46,67	38,17	46,67	122,26	46,68		
						Indeks kualitas Udara		95,92	79,81	95,92	120,18	95,93		
						Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		7,72	7,98	7,72	96,74	7,72		
						Persentase jumlah parameter kualitas air yang memenuhi baku	70.09							

[illegible]

2	11	03	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		2	2	2	100	2		
2	11	03	201	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1	1	1	100	1		
					Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK	1							
					Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	3							
2	11	03	203		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	1	1	1	1	100	1		
2	11	03	203	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		1	1	1	100	1		
						Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi di Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	1							

2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)		0,5	0,5	0,5	100	0,5		
2	11	04	201		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi		0,3	0,3	0,3	100	0,3		
2	11	04	201	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		1	1	1	100	1		
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3		30	70	65	92,85	70		
						Persentase Limbah B3 yang terkelola	82							
2	11	05	201		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3		30	70	60	85,71	70		
						Jumlah Rincian Teknis B3 yang dikeluarkan	20							
2	11	05	201	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		1	1	1	100	1		

					Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	24								
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		58	57,14	39	40	102,56	38			
2	11	06	201		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		38	102	156	147	94,23	149			
2	11	06	201	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	8	1	1	1	100	1			
2	11	06	201	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100	1			
					Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40								

					Hidup									
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha		40,38	50	31,49	62,98	40		
						Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/keg iatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	17.30							
2	11	08	201		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan		90	90	94	104,44	90		
						Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	60							
						Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	26	20	30	40	133,33	30		
2	11	08	201	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	30	10	10	10	100	10		

2	11	08	201	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		10	50	50	100	50		
2	11	08	201	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	300	782	250	300	120	200		
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan		18,98	10,59	18,98	179,22	9,26		
						Persentase sekolah Adiwiyata (%)		35,56	38	35,56	93,57	35		
						Persentase partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	22.22							
2	11	09	201		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT/Masyarakat/Lemabaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	784	782	300	782	260,67	300		
2	11	09	201	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5	18	16	24	150	16		

2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100		
2	11	10	201		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100		
						Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/dikelola	58.33							
2	11	10	201	01	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani		1	1	1	100	1		
					Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	7							
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Reduksi Sampah (%)		7,81	7,20	7,81	108,47	6,8		
						Persentase Volume sampah terangkut ke TPA		79,03	78	79,03	101,32	77,5		

						Persentase Jalur Wilayah Penyapuan		48,80	48,8	48,8	100	48,8		
						Persentase peningkatan retribusi persampahan		6,96	2,1	2,8	133,33	2,1		
						Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	67.13							
2	11	11	201		Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola di TPS 3R	57	100	100	100	100	100		
						Persentase Pengelolaan Sampah an Organik yang dikelola di Bank Sampah	92	59	50	55	110	50		
						Persentase Volume sampah terangkut ke TPA		77,04	78	79,03	101,32	50		
2	11	11	201	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		3	3	2	66,67	2		
2	11	11	201	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Terlaksananya Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pemngangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota		522	530	525	99,05	526		
2	11	11	201	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarna Penanganan Sampah untuk kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir	9	7	9	8	88,89	8		

					Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	128								
					Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	5015.1								
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah		A	A	A	A	A			
						Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah		3,61	3,5	3,2	91,42	3,5			
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89.60								
						Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	96.05								
						Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	90.15								
						Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan setiap tahun	1								
2	11	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH		100	A	A	100	A			
						Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100								
						Persentase Realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	100								

						Persentase Realisasi anggaran kegiatan dilingkup perangkat daerah	94.20							
2	11	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	100	3	3	100	3		
2	11	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	100	7	7	100	7		
2	11	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		100	100	100	100	100		
						Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	94.20							
						Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100							
2	11	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	238	304	302	302	100	302		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1							
2	11	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	100	100	100	100	100		
2	11	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	100	5	5	100	5		
2	11	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	3	100	2	2	100	2		

						Disediakan								
2	11	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	100	2	2	100	4		
2	11	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	100	1	1	100	1		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1							
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100							
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5							
2	11	01	207		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkategori baik	100	100	100	100	100	100		
2	11	1	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	135	140	135	135	100	135		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	141							
2	11	1	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	1	1	1	100	1		

					Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi								
2	11	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	20	10	10	100	6		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBM	100							
2	11	01	207	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	13	12	10	83,33	10		
2	11	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100	100		
2	11	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100	12		
2	11	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terlihat dalam tabel T-C.2.3 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan dukungan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaa administrasi dibidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Penyelenggaraan urusan umum, keuangan, dan penyusunan rencana Kegiatan;
- b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota Bogor;
- c. Melaksanakan inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan;
- d. Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kota Bogor;
- e. Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kota Bogor;
- f. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk kelembagaan kemasyarakatan Daerah kota Bogor;
- g. Pemberian penghargaan lingkungan hidup daerah kota Bogor;
- h. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penyelesaian pengaduan; dan
- j. pengelolaan sampah.

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKK	Target Renstra PD	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
			2025	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program 1 : Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	100	
2	Program 2 : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	20	48,75	
		Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	8	8,9	
3	Program 3 : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	100	100	
4	Program 4 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	58.32	58.33	
5	Program 5 : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat/ Lembaga/ kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	15	24.73	
6	Program 6 : Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan (%)	19	20,08	

		Persentase sekolah Adiwiyata (%)	35,60	36,86	
7	Program 7 : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	100	100	
8	Program 8 : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	4,17	4,25	
		Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS - 3R yang direhabilitasi	2,13	3,1	
		Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS - 3R yang ditingkatkan	98,16	98,48	
		Persentase Sarana Persampahan yang terpenuhi	100	100	
9	Program 9 : Pengelolaan Persampahan	Persentase Reduksi Sampah	8	8,21	
		Persentase Volume Sampah Tertangani	79,25	79,76	
		Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	94,97	96,05	
		Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	2,9	13,5	
10	Program 10 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	27,01	27,6	
		Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	26,55	26,4	
		Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	12,48	13,35	

		Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	21,97	22,25	
		Presentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	100	
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	100	
		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94	70,65	
		Persentase Kepatuhan Anggaran	100	100	
		Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95	90,7	
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94		
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11	88,13	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	88,75	92,81	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38	95,31	

		Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38	87,81	
--	--	--	-------	-------	--

Berdasarkan tabel 2.4 evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2025 yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra tahun 2025-2026, dapat disimpulkan bahwa 11 (sebelas) indikator kinerja program telah tercapai targetnya semua

Tabel 2.6. Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 sampai tahun 2029

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Catatan Analisis
			2026 (thn n)	2027 (thn n+1)	2028 (thn n+2)	2029 (thn n+3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program 1 : Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	40	60	-	80	
2	Program 2 : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	70.09	70.12	70.21	70.4	
		Persentase jumlah Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	76.67	77.78	78.89	80	
		Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,02	0,03	0,04	0.05	
3	Program 3 : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	82	83	84	85	
4	Program 4 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	58.45	58.58	59.71	60.84	

5	Program 5 : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	17.30	17.35	17.40	17.60	
6	Program 6 : Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	22.22	22.24	22.26	22.30	
7	Program 7 : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	
8	Program 8 : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	66.67	75	75.26	83.25	
9	Program 9 : Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola di TPS- 3R dan Bank Sampah	67.13	67.23	67.33	67.44	
10	Program 10 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP di lingkup perangkat daerah	89.60	89.65	89,70	89,75	
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	96.05	96.10	96.15	96.20	
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	90.15	90.25	90.35	90.40	
		Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan setiap tahun	1	1	1	1	

Tabel 2.7
Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2025	
		Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Air	71.30	66.94
2	Indeks Kualitas Udara	55.63	67.63
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	38.81	38.73
4	Persentase Cakupan layanan pengelolaan sampah	4.17	6.78
5	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	0.3	0.3

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detil bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah.

Dengan terbitnya UU tersebut tidak banyak terjadi perubahan terhadap pembagian urusan antara Pemerintah yang berimplikasi terhadap perubahan sub-sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota. Oleh karenanya, dari sisi kewenangan tidak terjadi perubahan yang sangat drastis terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan bidang lingkungan hidup dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH akan dipaparkan berdasarkan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sesuai dengan Perwali nomor 162 tahun 2021.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, serta UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini publik yang harus segera dicari penyelesaiannya. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro. Isu-isu yang berkembang di masyarakat harus didukung oleh data-data yang valid, sehingga bukan isu yang tanpa dasar.

Strategis merupakan hal sangat penting, mendasar dan prioritas yang menghasilkan efek tertentu dan sangat menentukan kondisi selanjutnya.

Isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan. Antisipasi terhadap kondisi ini pada masa depan adalah dengan melakukan berbagai tindakan yang tepat serta menjalankan aturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Isu lainnya adalah mengatasi semakin meningkatnya pencemaran lingkungan dan pemanasan suhu udara akibat polusi yang ditimbulkan oleh semakin meningkatnya kendaraan bermotor dan proporsi ruang terbangun. Oleh karena itu diperlukan integrasi dengan tantangan transportasi dan tata ruang yang ramah lingkungan.

Adapun permasalahan mendesak yang harus segera ditangani terkait dengan kondisi lingkungan di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah yang belum terpadu

Permasalahan yang terjadi adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya di kota-kota besar, permasalahan yang timbul terutama karena

- a. Besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi

- b. Keterbatasan untuk pembuangan akhir sampah, sampai saat ini Kota Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) masih terletak di Kabupaten Bogor.
- c. Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta bau yang tidak sedap, Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industri.

Secara umum, peningkatan pelayanan sampah di Kota Bogor didukung oleh peningkatan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah dan disertai peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

2. Masalah Pencemaran Air

a. Pencemaran Air Tanah

Air tanah atau air bawah permukaan, berdasarkan letak, sifat dan kondisinya fisiknya dapat dikelompokkan ke dalam air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal terdapat pada akuifer dan pada bagian atasnya tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Air tanah dalam dijumpai pada sumur-sumur bor. Kedalaman permukaan air tanah sangat ditentukan oleh topografi setempat, yaitu pada tempat bertopografi rendah, dan pada tempat dengan topografi tinggi.

b. Pencemaran Air Permukaan

Air permukaan adalah badan air yang terbuka yang dapat berupa sungai atau situ. Sumber pencemaran terhadap air permukaan di Kota Bogor terutama adalah pabrik, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, dan rumah tangga yang membuang limbahnya langsung ke badan air. Limbah tersebut dapat menurunkan kualitas fisik, kimia dan biologis air sungai atau situ.

Hasil pemantauan parameter pencemaran di bagian hilir, tengah dan hulu sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung beserta anak-anak sungainya dimana masih ada yang menunjukkan bahwa kandungan BOD, COD, kekeruhan dan coli tinja pada titik pemantauan relative tinggi. Demikian juga hasil pengukuran pada inlet dan outlet Situ Gede dan Situ Panjang. Kandungan coli tinja

yang tinggi menyebabkan badan air tersebut tidak layak untuk keperluan rumah tangga, terutama mandi dan mencuci bahan makanan.

3. Masalah Pencemaran Udara dan Kebisingan

Pencemaran udara dapat berupa meningkatnya kandungan debu, polutan atau timbulnya bau yang tidak sedap di udara. Debu timbul dari aktivitas transportasi dan kegiatan pembangunan fisik yang menimbulkan penimbunan, pembongkaran bangunan. Pencemaran udara akibat debu sifatnya fluktuatif, dan intensitasnya tinggi terutama pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan relative rendah karena partikel debu akan larut oleh air hujan.

Polutan udara umumnya bersumber dari sisa pembakaran sumber energi dalam aktifitas permukiman, transportasi dan industri. Polutan yang banyak menjadi masalah dari aktivitas terutama adalah CO, Timbal (Pb), Hidrokarbon, SO₂, H₂S dan NH₃.

Sumber utama pencemaran udara dan kebisingan di Kota Bogor adalah aktivitas transportasi. Tingginya arus transportasi terutama angkutan umum telah menimbulkan pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. Berdasarkan uji pemantauan di beberapa lokasi sample menunjukkan bahwa peningkatan kandungan NO₂ pada beberapa lokasi telah melampaui baku mutu lingkungan. Demikian juga untuk senyawa lain seperti CO dan Hidrokarbon.

Berdasarkan hasil pemantauan selama tiga tahun terakhir tingkat kebisingan yang terjadi di Kota Bogor disebabkan oleh aktivitas transportasi dan industri.

4. Pencegahan Dampak Lingkungan

Upaya untuk meminimalkan dampak yang terjadi serta menghindari penurunan kualitas lingkungan maka upaya preventif harus dilakukan mengingat perbaikan lingkungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Upaya pencegahan dimulai dari awal aktivitas antara lain: Rencana Pembangunan di Kota Bogor diharuskan dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa: AMDAL, UPL-UKL, SPPL yang dapat membantu Pemda dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi bahan acuan

pengawasan. Pemantauan dan pengawasan dari pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dilakukan setiap tahun untuk kegiatan atau usaha dan dituangkan dalam monitoring dan evaluasi.

Mengacu Pasal 22 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal/UKL/UPL. Amdal merupakan bagian dari sistem perencanaan, Amdal/UKL/UPL seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan dan gambaran yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan timbul oleh sebuah kegiatan.

5. Pengendalian Perubahan Iklim

Perubahan iklim. Melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional bahwa pemerintah kabupaten/kota diwajibkan menyusun Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK). Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk menyusun laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) setiap setahun sekali. Dokumen Inventarisasi GRK menjadi data dasar sekaligus jembatan menuju penyusunan mitigasi yang ideal dan holistik. Rangkaian penyediaan data dasar ilmiah menjadi syarat utama mitigasi GRK berkelanjutan menuju capaian SDGs 13 tentang perubahan iklim. Kota Bogor telah melaksanakan penyusunan inventarisasi GRK secara kontinyu sejak 2013. Penyusunan dokumen inventarisasi GRK Kota Bogor bertujuan untuk melakukan estimasi ulang terhadap perubahan emisi tahunan. Estimasi tersebut akan berperan sebagai pembaharuan data GRK sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program-program untuk menekan rasio peningkatan GRK Kota Bogor. Penyusunan dokumen ini sekaligus

dapat berperan sebagai dasar mitigasi maupun pendekatan penyempurnaan mitigasi yang telah ada bagi upaya pengendalian emisi GRK pada tahap berikutnya.

6. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih sulit merealisasikan penyediaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan RTH. minimnya RTH di Kota Bogor dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pembelian tanah atau land banking. Apalagi, harga tanah di perkotaan relatif lebih mahal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup telah sesuai dengan Program/Kegiatan yang ada di RPJMD Kota Bogor tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026;
2. Hasil analisa kebutuhan untuk tahun 2026 telah menggunakan Kepmendagri nomer 050-3708 tahun 2026 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Setelah dilakukan pemetaan terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 semua kegiatan telah terdefinisikan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur nya.

Tabel 2.8. (T-C. 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kota Bogor	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	66,67%	9.226.606.538	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kota Bogor	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	66,67%	7.915.840.789	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di	Kota Bogor	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana	98,62%	9.226.606.538	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di	Kota Bogor	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana	98,62%	7.915.840.789	

	Daerah Kabupaten/Kota		persampahan			Daerah Kabupaten/Kota		persampahan			
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS- 3R/ TPS yang dibangun	547,18 Ton/Hari	-	Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	547,18 Ton/Hari		
2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS- 3R/ TPS yang ditingkatkan	557 Ton/hari	1.375.314.907	Peningkatan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	557 Ton/hari	1.198.843.7.35	
3	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS- 3R/ TPS yang di optimalisasi	40 Unit	200.000.000	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di optimalisasi	40 Unit	169.999.800	
4	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS- 3R/ TPS yang di sediakan	1240 Unit	7.651.291.631	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	1240 Unit	6.546.997.254	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					

	LINGKUNGAN HIDUP					LINGKUNGAN HIDUP					
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	40%	420.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	40%	420.000.000	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	1 Dokumen	420.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	1 Dokumen	420.000.000	
5	Peninjauan kembali terhadap RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	420.000.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	420.000.000	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Kota Bogor	Persentase jumlah parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	70,09%	1.439.999.616	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Kota Bogor	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	70,09%	1.439.999.616	

	HIDUP					HIDUP					
		Kota Bogor	Persentase jumlah parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu	76,67%			Kota Bogor	Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	76,67%		
			Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,02%				Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,02%		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Air, Sungai dan Situ	39 Titik	1.439.999.616	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Air, Sungai dan Situ	39 Titik	1.439.999.616	
		Kota Bogor	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	10 Titik			Kota Bogor	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	10 Titik		
		Kota Bogor	Jumlah Pembinaan kampung iklim	10 Lokasi			Kota Bogor	Jumlah Pembinaan kampung iklim	10 Lokasi		

			kota Bogor					kota Bogor			
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota Bogor	Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut yang dipantau	2 Dokumen	900.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	900.000.000	
7	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK	1 Dokumen	149.999.900	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	149.999.900	
8	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	1 Dokumen	140.000.000	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah		Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	1 Dokumen	140.000.000	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	1 Laporan	249.999.716	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	1 Laporan	249.999.716	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	249.999.716	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	249.999.716	
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kota Bogor	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	82%	168.988.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kota Bogor	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	82%	168.988.000	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Persentase Jumlah Rincian Teknis B3 yang dikeluarkan	20%	168.988.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Persentase Jumlah Rincian Teknis B3 yang dikeluarkan	20%	168.988.000	
10	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	24 Laporan	168.988.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan	24 Laporan	168.988.000	

								Limbah B3			
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Bogor	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	58,45%	303.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Bogor	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	58,45%	303.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah laporan dari usaha dan atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah Kab/Kota	38%	303.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah laporan dari usaha dan atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah Kab/Kota	38%	303.000.000	

11	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Bogor	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	8 Dokumen	103.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Bogor	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	8 Dokumen	103.000.000	
12	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40 Badan/Usaha	200.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40 Badan/Usaha	200.000.000	
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	Kota Bogor	Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam	17,30%	800.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	Kota Bogor	Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam	17,30%	800.000.000	

	HIDUP UNTUK MASYARAKAT		pengelolaan Lingkungan Hidup			HIDUP UNTUK MASYARAKAT		pengelolaan Lingkungan Hidup			
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	60 Pelaku kegiatan/ usaha	800.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	60 Pelaku kegiatan / usaha	800.000.000	
			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	26 Lembaga				Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	26 Lembaga		
13	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	300 Orang	300.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	300 Orang	300.000.000	

14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	30 Lembaga	500.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	30 Lembaga	500.000.000	
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Bogor	Persentase partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	22.22%	550.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Bogor	Persentase Sekolah Adiwiyata (%)	22.22%	550.000.000	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah / Kelompok Masyarakat	550.000.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah / Kelompok Masyarakat	550.000.000	

15	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	550.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	550.000.000	
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100%	50.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100%	50.000.000	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada	58,33%	50.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada	58,33%	50.000.000	

			dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti					dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti			
16	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	7 Pengaduan	50.000.000	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	7 Pengaduan	50.000.000	
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Bogor	Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	67,13%	18.204.371.100	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Bogor	Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	67,13%	18.204.371.100	
	Pengelolaan Sampah	Kota Bogor	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R dan Bank Sampah	57 %	18.204.371.100	Pengelolaan Sampah	Kota Bogor	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	57 %	18.204.371.100	
			Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	92%				Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	92%		

17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9 unit	14.402.788.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9 unit	14.402.788.000	
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	5015,1 Ton	952.468.800	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	5015,1 Ton	952.468.800	
19	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Kota Bogor	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	128 unit	2.849.114.300	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Kota Bogor	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	128 unit	2.849.114.300	
XI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bogor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89,60 Nilai	108.982.581.239	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89,60 Nilai	108.982.581.239	
			Tingkat Kepatuhan	96.05%				Tingkat Kepatuhan	96.05%		

			Pengelolaan Keuangan					Pengelolaan Keuangan			
			Nilai Survey Kepuasan	90.15 Nilai				Nilai Survey Kepuasan	90.15 Nilai		
			Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan	1 inovasi/ tahun				Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan	1 Inovasi/ tahun		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100%	119.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100%	119.000.000	
			Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun	100%				Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun	100%		
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	119.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	119.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	100%	31.885.400.373	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	100%	31.885.400.373	
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/Bulan	31.775.480.373	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/Bulan	31.775.480.373	

22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	109.920.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	109.920.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.315.845.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.315.845.700	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	448.539.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	448.539.300	
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	89.980.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	89.980.000	
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	360.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	360.000.000	

26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	113.182.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	113.182.400	
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	304.144.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	304.144.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	673.883.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	673.883.100	
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	673.883.100	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	673.883.100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	47.812.487.030	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	47.812.487.030	

29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	399.261.854	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	399.261.854	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	47.413.225.176	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.962.801.95	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	27.175.965.036	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	27.175.965.036	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	26.818.929.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	24.491.768.400	
32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha	141 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire	141 Unit	351.404.663	

			bilitasi					habilitasi			
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	207.035.336	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	79.459.663	
			JUMLAH		140.145.546.493	JUMLAH				122.970.054.406	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Kegiatan yang merupakan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang masuk forum Musreimbang baik tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2026 terdapat dalam tabel T-C.32

Usulan-usulan tersebut telah sesuai dengan isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup yaitu adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dalam hal ini terkait dengan pengelolaan persampahan.

**Tabel 2.9. (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kota Bogor Jawa Barat**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	POKIR				
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota				

	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	RT 01,02,03 RW 01 Kelurahan Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat		3 unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 02 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 04 Kelurahan Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 03 RW 07 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 12 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 03 RW 08 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01,02,03,04 RW 06 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur		8 Unit	Tempat Sampah
		RT 01 RW 12, 08, 01, 03,04,05,06,09,10,11 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat		10 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 03 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 02 RW 02 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal		1 Unit	
		RT 01 RW 04 Kelurahan Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 04 RW 04 Kelurahan Balumbangjaya Kecamatan Bogor Barat		5 Unit	
		RT 01 RW 10 Kelurahan Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah		2 Unit	Gerobak Sampah

		RT 04 RW 01 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 06 Kelurahan Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 06 RW 03 Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 04 RW 01 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal		1 Unit	Bak Sampah
		RT 01 RW 02 Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah		1 Buah	
		RT 03 RW 04 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 05 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 02 RW 10 Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 02 RW 02 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal		1 Unit	
		RT 01 RW 08 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan		3 Unit	
		RT 01 RW 09 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara		5 Buah	
		RT 05 RW 03 Kelurahan Tegal gundil Kecamatan Bogor Utara		1 Unit	
		RT 04 RW 09 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara		1 Unit	
		RT 02 RW 04 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor		2 Unit	Gerobak Sampah

		Timur			
		RT 05 RW 10 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur		1 bangunan konstruksi	
		RT 01 RW 05 Kelurahan Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 01 Kelurahan Kebon Kalapa Kecamatan Bogor Tengah		300 Orang	
		RT 01 RW 11 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan		2 Unit	
		RT 01 RW 07 Kelurahan Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 10 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara		10 Buah	
	MUSRENBANG				
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota				
	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Cilubang Situgede Bogor Barat		1 unit	Gerobak
		Kelurahan Loji Jl Siaga Komp Pertanian Loji No. 49 Bogor Barat		1 unit	Gerobak
		RW 001 Jalan RE. Abdullah Gang Buntu III Bogor Barat		1 unit	Dropbox
		RW 10 Cilendek Barat Cemplang Baru RW 10 Bogor Barat		1 Buah	Dropbox
		Jl Mawar Kelurahan Sindangrasa		2 Paket	Tempat Sampah Terpilah

	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	TPS Griya Katulampa		1 Paket	TPS
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pabaton Bogor Tengah		1 Paket	Sosialisasi
		Kedunghalang Poncol Sukaresmi Tanah Sareal		1 Paket	Sosialisasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2026 adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen Renja ini memuat informasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, meliputi program kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan rencana tingkat capaian (target) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2026. Program dan kegiatan yang disasar tersebut tidak lepas dari kerangka kebijakan nasional sehingga perlu untuk menelaahnya dan menyesuaikan dengan kebijakan baik tingkat nasional maupun provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kota Bogor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Bogor yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan daerah harus sejalan dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional maka diperlukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi.

Dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

- a. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

- b. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- e. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- g. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- h. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 akan mengacu pada prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, arahan Presiden, dan visi misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan dalam RPJMD 2025-2029. RKDP 2026 juga akan menjadi dasar penyusunan APBN 2026 dan pelaksanaan pembangunan nasional. RKP 2026 harus selaras dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan, termasuk kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

Tema Pembangunan Jawa Barat tahun 2026 adalah *"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"*. Tema ini sejalan dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2026.

Tema ini juga sejalan dengan visi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 yaitu *"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"* dan visi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 yaitu *"NKRI yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"*

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan pada 11 sub bidang yaitu :

Tabel 3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

K.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi.	RPPLH kabupaten/kota.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk KRP provinsi.	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
			Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11.	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (<i>landfill gas</i>) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.		pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis.

Visi Misi RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 adalah :

Bogor Beres – Bogor maju.

Misinya adalah :

Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera dan Bogor Lancar.

Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Strategi merupakan aturan atau arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang dapat meliputi kegiatan atau program secara keseluruhan. Strategi dibangun melalui pemanfaatan semua kekuatan (sumberdaya) dan peluang secara optimal serta memperhatikan semua kelemahan dan ancaman sebagai bahan koreksi. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dengan memanfaatkan semua kelebihan dan meminimumkan kelemahan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Tabel berikut menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Berikut indikator sasaran, dan target kinerja sasaran untuk 2 tahun ke depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, sehingga bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH TAHUN 2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2026
Sasaran RPJMD 1 : Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan			IK Sasaran RPJMD 1 : Indeks Kualitas Air	Poin	71.50
			IK Sasaran RPJMD 2 : Indeks Kualitas Udara	Poin	56.03
			IK Sasaran RPJMD 3 : Indeks Kualitas Lahan	Poin	38.88
	Tujuan Renstra : Terwujudnya Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup		IK Tujuan 1 : Indeks Kualitas Air	Poin	71.50
			IK Tujuan 2 : Indeks Kualitas Udara	Poin	56.03
			IK Tujuan 3 : Indeks Kualitas Lahan	Poin	38.88

		Sasaran Renstra 1 : Terkendalnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	IK Sasaran : Persentase jumlah parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	Persentase	79.16
			IK Sasaran : Persentase jumlah parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Persentase	88
			IK Sasaran : Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	Ha	1
Sasaran RPJMD 2: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca			IK Sasaran RPJMD: Penurunan emisi GRK Kumulatif (Ton CO2Eq)	Persentase	3.62
			IK Tujuan 4 : Persentase sampah terkelola	Persentase	94.13
		Sasaran Renstra 2 : Meningkatnya Reduksi Sampah di Sumber	IK Sasaran : Persentase timbulan sampah terdaur ulang	Persentase	22.68
			IK Sasaran : Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase	72.81
		Sasaran Renstra 3 : Meningkatnya Kualitas Penanganan Sampah	IK Sasaran : Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persentase	24.59
Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			IK Sasaran RPJMD: Indeks Pelayanan Publik		

	Tujuan Renstra : Terwujudnya Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup		IK Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	86.5
		Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	Nilai	89.60
			Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Persentase	3.62
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	Persentase	96.5
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi/Tah un	1

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Visi pembangunan sebagaimana tertuang dalam dalam Ranwal RPJMD Kota Bogor 2025-2029 adalah:

“BOGOR BERES – BOGOR MAJU”

Yang dimaksud Bogor Beres – Bogor Maju adalah :

1. Bogor Beres : mengandung pengertian Mewujudkan peningkatan Pendidikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Bogor Maju : Mewujudkan kemajuan Kota Bogor dengan ciri khas kebudayaan dan karakter masyarakat yang kuat;

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:

1. Bogor CERDAS : Memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat, serta memberdayakan Lembaga Pendidikan formal dan non formal, selain itu juga memastikan pengelolaan pembangunan yang baik disertai dengan aparatur yang cerdas dan pelayanan public yang semakin inovatif.
2. BOGOR SEHAT : Memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia
3. BOGOR SEJAHTERA : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirasusahaan, mengembangkan industry kreatif yang inovatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. BOGOR LANCAR : Menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas public.

Berpedoman pada visi dan misi RPJMD maka dirumuskan Tujuan Pembangunan Renstra Dinas Lingkungan Kota Bogor 2025-2029 Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan
2. Meningkatnya Pelayanan Persampahan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Terkendalinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
2. Meningkatnya Reduksi Sampah
3. Meningkatnya Kualitas Pengolahan Sampah di fasilitas pengolahan sampah
4. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 1 (satu) melalui 9 (Sembilan) program yaitu : (1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (2) Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3), (3) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH, (4) Program Peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, (5) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, (6) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, (7) Program Pengelolaan Persampahan dan (8) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, (9) Program Perencanaan Lingkungan dan (10) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Setelah dilakukan pemetaan sesuai Kepmendagri Nomor 900 - 2850 Tahun 2025 maka disepakati bahwa dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2021 terdiri dari 11 program 17 kegiatan, dan 32 sub kegiatan yang telah sesuai dengan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur dalam Kepmendagri Nomor 900 - 2850 Tahun 2025.

Total Kebutuhan dana/Pagu Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 adalah sebesar Rp. 140.145.546.493,- (Seratus empat puluh milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah)

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2026 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2026 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.33:

Tabel 3.3. (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Provinsi/Kabupaten/Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	Kota Bogor	66,67%	7,915,840,789	APBD		75%	13.380.000.000
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Kota Bogor	98,62%	7,915,840,789	APBD		99%	13.380.000.000

1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	Kota Bogor	547,18 Ton/Hari	-	APBD		547,98 Ton	300.000.000
2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	Kota Bogor	557 Ton/hari	1,198,843,735	APBD		579 Ton/hari	1.300.000.000
3	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	Kota Bogor	40 Unit	169,999,800	APBD		42 Unit	280.000.000
4	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	Kota Bogor	1240 Unit	6,546,997,254	APBD		1243 Unit	11.500.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	Kota Bogor	40%	424,143,000	APBD		60%	400.000.000
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Kota Bogor	1 Dokumen	424,143,000	APBD		1 Dokumen	400.000.000
5	Peninjauan kembali terhadap RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPL Kabupaten/Kota yang dilakukan peninjauan kembali	Kota Bogor	1 Dokumen	424,143,000	APBD		1 Dokumen	400.000.000
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	Kota Bogor	70,09%	1,267,160,740	APBD		70,12%	2.000.000.000

	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
		Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	Kota Bogor	76,67%		APBD		77,78%
		Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	Kota Bogor	0,02%		APBD		0,03%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Air, Sungai dan Situ	Kota Bogor	39 Titik	1,117,621,040	APBD		39 Titik 1.750.000.000
		Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	Kota Bogor	10 Titik		APBD		10 Titik
		Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	Kota Bogor	10 Lokasi		APBD		10 Lokasi
6	Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut yang dipantau	Kota Bogor	2 Dokumen	889,961,540	APBD		2 Lokasi 1.400.000.000
7	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK	Kota Bogor	1 Dokumen	87,700,700	APBD		1 Dokumen 200.000.000
8	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	Kota Bogor	1 Dokumen	139,958,800	APBD		1 Dokumen 150.000.000
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	Kota Bogor	1 Laporan	149,539,700	APBD		1 Laporan 250.000.000

9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi di Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	Kota Bogor	1 Kegiatan	149,539,700	APBD		1 Kegiatan	250.000.000
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	Kota Bogor	82%	115,488,900	APBD		46%	300.000.000
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Jumlah Rincian Teknis B3 yang dikeluarkan	Kota Bogor	20%	115,488,900	APBD		83%	300.000.000
10	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kota Bogor	24 Laporan	115,488,900	APBD		2 Laporan	300.000.000
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Bogor	58,45%	242,234,100	APBD		58,58%	350.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan	Kota Bogor	38%	242,234,100	APBD		78,57%	350.000.000
11	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis,	Kota Bogor	8 Dokumen	45,190,000	APBD		8 Dokumen	150.000.000

	Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan							
12	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Bogor	40 Badan/ Usaha	197,044,100	APBD		44 Badan/ Usaha	200.000.000
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok Masyarakat/ Lembaga/ kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	17,30%	575,226,500	APBD		17,35%	1.100.000.000
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	Kota Bogor	60 Pelaku kegiatan/ usaha	575,226,500	APBD		45 Pelaku kegiatan/ usaha	1.100.000.000
		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup		26 Lembaga				70 Lembaga	

13	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Bogor	300 Orang	222,646,800	APBD		300 Orang	300.000.000
14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kota Bogor	30 Lembaga	352,579,700	APBD		35 Lembaga	800.000.000
VII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Adiwiyata	Kota Bogor	22.22%	550,000,000	APBD		39,16%	600.000.000
		Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan		22,24%				22,24%	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat	550,000,000	APBD		784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat	600.000.000
15	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Bogor	5 Entitas	550.000.000	APBD		5 Entitas	600.000.000
VIII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	Kota Bogor	100%	3,727,400	APBD		100%	50.000.000

	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/dikelola	Kota Bogor	58,33%		APBD		75%	50.000.000
16	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Kota Bogor	7 Pengaduan	3,727,400	APBD		9 Pengaduan	50.000.000
IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	Kota Bogor	67,13%	9,828,689,840	APBD		67,23%	13.220.000.000
	Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	Kota Bogor	57 %	9,828,689,840	APBD		58%	13.220.000.000
		Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah		92%				93%	
17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Bogor	9 unit	5,941,292,540	APBD		10 Unit	9.000.000.000
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Kota Bogor	5015,1 Ton	952,466,100	APBD		5051,6 Ton	1.220.000.000

19	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kota Bogor	128 unit	2,934,931,200	APBD		129 Unit	3.000.000.000
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Bogor	89,60 Nilai	102,047,543,137	APBD		89,60 Nilai	
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan		96.05%		APBD		95%	
		Nilai Survey Kepuasan		90.15 Nilai		APBD		3,63 Nilai	
		Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan		1 inovasi/ta hun		APBD		1 Buah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	Kota Bogor	100%	105,000,600	APBD		100%	130.000.000
		Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun		100%				100%	
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	5 Laporan	105,000,600	APBD		5 Laporan	130.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	Kota Bogor	100%	31,398,694,878	APBD		100%	34.859.920.000
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	238 Orang/Bulan	31,302,274,878	APBD		225 Orang/Bulan	34.750.000.000
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Kota Bogor	1 Laporan	96,420,000	APBD		1 Laporan	109.920.000

	SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Bogor	100%	833,017,110	APBD		100%	1.365.000.000
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	201,625,400	APBD		1 Paket	495.000.000
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	5 Paket	89,980,000	APBD		5 Paket	110.000.000
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	3 Paket	205,330,000	APBD		3 Paket	400.000.000
26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	79,862,400	APBD		1 Paket	110.000.000
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	256,219,310	APBD		1 Laporan	250.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Kota Bogor	100%	349,002,800	APBD		100%	300.000.000
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Bogor	5 Unit	349,002,800	APBD		5 Unit	300.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bogor	100%	44,439,194,907	APBD		100%	46.812.500.000
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Kota Bogor	12 Laporan	476,392,955	APBD		12 Laporan	412.500.000

	Daya Air dan Listrik	Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	43,962,801,952	APBD		12 Laporan	46.400.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	Kota Bogor	100%	24,922,632,842	APBD		100%	27.355.000.000
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	141 Unit	24,491,768,400	APBD		141 Unit	26.200.000.000
32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bogor	1 Unit	351,404,779	APBD		1 Unit	660.000.000
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bogor	10 Unit	79,459,663	APBD		10 Unit	495.000.000
					122,970,054,406				142.222.420.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Seluruh kegiatan yang dikembangkan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam membuat rencana program dan kegiatan ini, pada dasarnya jenis belanja yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu Belanja Tidak Langsung yang meliputi gaji dan tunjangan bagi pegawai serta Belanja Langsung yang merupakan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. Untuk membiayai kedua jenis belanja tadi, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan Dana APBD Kota Bogor.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025 yaitu :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - 1) Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - 2.1 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - 2.2 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - 2.3 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - 2.4 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 1) Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Sub Kegiatan :
 - a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - b) Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - c) Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
 - 2) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3)
 - 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
Sub Kegiatan :
 - a) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH)
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
- b) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- c) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- 1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- 1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- a) Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

9. Program Pengelolaan Persampahan

- 1) Kegiatan Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan :

- a) Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah
- b) Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah
- c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.1. Renja 2026 Dinas Lingkungan Hidup

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	Kota Bogor	66,67%	7,915,840,789	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Kota Bogor	98,62%	7,915,840,789	
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	Kota Bogor	547,18 Ton/Hari	-	
2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	Kota Bogor	557 Ton/hari	1,198,843,735	
3	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	Kota Bogor	40 Unit	169,999,800	
4	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	Kota Bogor	1240 Unit	6,546,997,254	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	Kota Bogor	40%	424,143,000	

	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Kota Bogor	1 Dokumen	424,143,000	
5	Peninjauan kembali terhadap RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPL Kabupaten/Kota yang dilakukan peninjauan kembali	Kota Bogor	1 Dokumen	424,143,000	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	Kota Bogor	70,09%	1,267,160,740	
		Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	Kota Bogor	76,67%		
		Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	Kota Bogor	0,02%		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Air, Sungai dan Situ	Kota Bogor	39 Titik	1,117,621,040	
		Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	Kota Bogor	10 Titik		
		Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	Kota Bogor	10 Lokasi		
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut yang dipantau	Kota Bogor	2 Dokumen	889,961,540	
7	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK	Kota Bogor	1 Dokumen	87,700,700	
8	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	Kota Bogor	1 Dokumen	139,958,800	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	Kota Bogor	1 Laporan	149,539,700	

9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi di Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	Kota Bogor	1 Kegiatan	149,539,700	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	Kota Bogor	82%	115,488,900	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Jumlah Rincian Teknis B3 yang dikeluarkan	Kota Bogor	20%	115,488,900	
10	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kota Bogor	24 Laporan	115,488,900	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Bogor	58,45%	242,234,100	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan	Kota Bogor	38%	242,234,100	
11	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Kota Bogor	8 Dokumen	45,190,000	
12	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Bogor	40 Badan/ Usaha	197,044,100	
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kelompok Masyarakat/ Lembaga/ kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	17,30%	575,226,500	

	UNTUK MASYARAKAT					
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	Kota Bogor	60 Pelaku kegiatan/usaha	575,226,500	
		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup		26 Lembaga		
13	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Bogor	300 Orang	222,646,800	
14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kota Bogor	30 Lembaga	352,579,700	
VII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Adiwiyata	Kota Bogor	22.22%	550,000,000	
		Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan		22,24%		
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat	550,000,000	
15	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Bogor	5 Entitas	550.000.000	
VIII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran /	Kota Bogor	100%	3,727,400	

		kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti				
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/dikelola	Kota Bogor	58,33%		
16	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Kota Bogor	7 Pengaduan	3,727,400	
IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	Kota Bogor	67,13%	9,828,689,840	
	Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	Kota Bogor	57 %	9,828,689,840	
		Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah		92%		
17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Bogor	9 unit	5,941,292,540	
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Kota Bogor	5015,1 Ton	952,466,100	
19	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kota Bogor	128 unit	2,934,931,200	
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Bogor	89,60 Nilai	102,047,543,137	
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan		96.05%		
		Nilai Survey Kepuasan		90.15 Nilai		

		Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan		1 inovasi/tahun		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	Kota Bogor	100%	105,000,600	
		Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun		100%		
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	5 Laporan	105,000,600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	Kota Bogor	100%	31,398,694,878	
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	238 Orang/Bulan	31,302,274,878	
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	96,420,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Bogor	100%	833,017,110	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	201,625,400	
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	5 Paket	89,980,000	
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	3 Paket	205,330,000	
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	79,862,400	
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	256,219,310	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Kota Bogor	100%	349,002,800	
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Bogor	5 Unit	349,002,800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa	Kota Bogor	100%	44,439,194,907	

	Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah				
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	476,392,955	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	43,962,801,952	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berondisi baik	Kota Bogor	100%	24,922,632,842	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	141 Unit	24,491,768,400	
32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bogor	1 Unit	351,404,779	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bogor	10 Unit	79,459,663	
					122,970,054,406	

BAB V

P E N U T U P

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2026 yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun secara administrasi. Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah disusun.

Penyusunan Renja ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Diharapkan Renja ini dapat bermanfaat sebagai pedoman operasional bagi aparat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan diperlukan konsistensi dan disiplin yang kuat dari setiap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk merealisasikan Rencana Kerja ini agar terciptanya Kota Bogor yang bersih, nyaman dan berwawasan lingkungan.

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

Nomor : 22 TAHUN 2025

Tanggal : 24 Agustus 2025

Tentang : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

BOGOR TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis Dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya

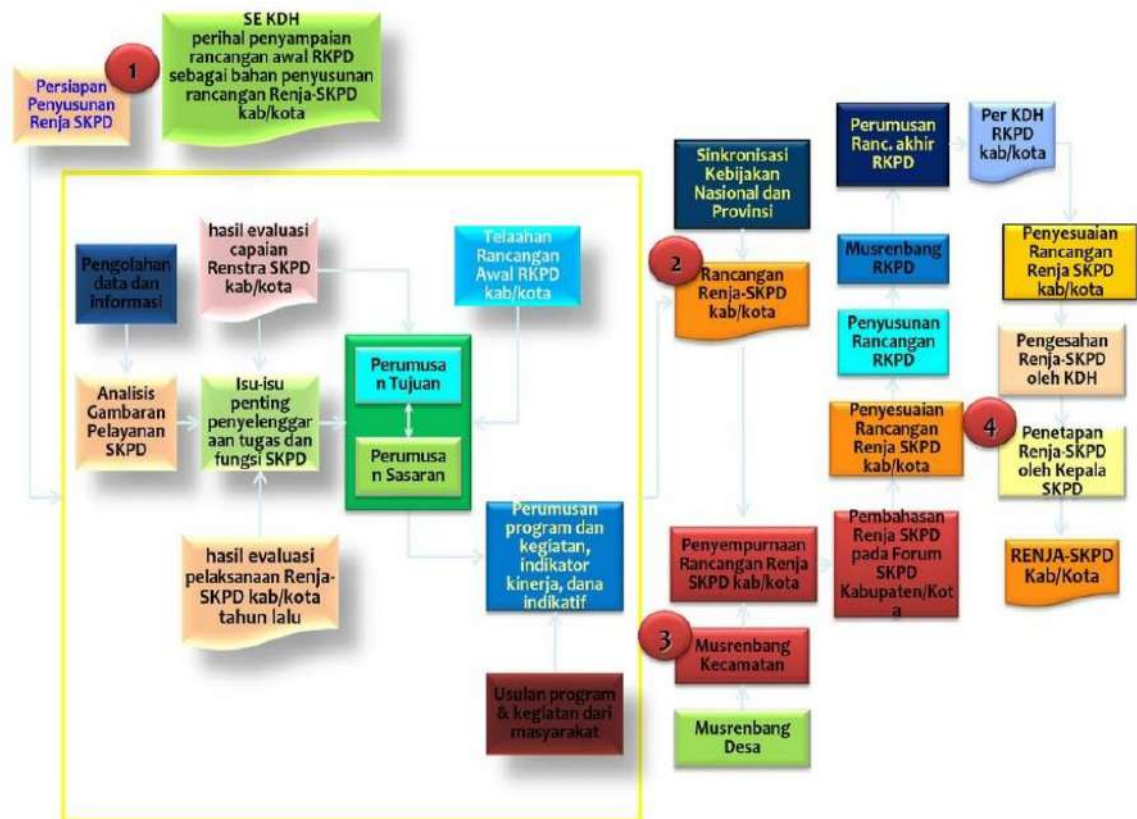
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 14 tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2025 sehingga perlu disusun Perubahan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2025 dan perlu disusun juga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2025.

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan sektor lingkungan hidup. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Kota Bogor no 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota No 162 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Program dan Kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang 3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, indikator kinerja program (outcome) , indikator kinerja kegiatan (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten / Kota



Rancangan Renja PD dibahas pada forum PD dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, pokok-pokok pikiran dewan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Renja PD ditetapkan melalui keputusan Walikota. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada RKPD Kota Bogor Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan;
- Penyusunan rancangan awal;

- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan Renja.

Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bogor.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor yang dibebani tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan daerah Kota Bogor di bidang Lingkungan Hidup, yang eksistensi dan kewenangannya dinyatakan secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, yang tertuang di dalam beberapa produk perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 48510)
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5059);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E)
11. Peraturan Walikota Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini adalah untuk memberi gambaran informasi Program, kegiatan-kegiatan serta rencana Anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada tahun 2026, baik Belanja Tidak Langsung maupun pelaksanaan Belanja Langsung.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana kerja ini adalah untuk :

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2026 yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat Kota Bogor;
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 yang berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2025 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Bogor Tahun 2023;
3. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.
4. Peningkatan kualitas perencanaan terhadap program dan kegiatan yang sistimatis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan antisipasi dampak perubahan iklim
5. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan,

pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, keterkaitan antara Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan dokumen RKPD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor serta ditindaklanjuti dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor serta susunan garis besar dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Lalu dan Capaian Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun lalu dan realisasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mengacu pada laporan kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan / atau realisasi APBD untuk Dinas yang bersangkutan.

Tabel yang perlu disajikan dalam bagian ini adalah tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor dan Pencapaian Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (tabel 1).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

- c. Dampaknya terhadap pencapaian RPJMD dan terhadap capaian program nasional seperti SPM.
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

- 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
- 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
- 4. Lampiran tabel berikut, Tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai :

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor tahun 2026 dan prakiraan maju (tahun $n+1$), sebagaimana tabel 2.

Bab IV. Penutup.

Berisikan uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BOGOR TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 serta Capaian Program sesuai dengan Renstra DLH Kota Bogor Tahun 2025-2026 mencakup 11 (sebelas) Program dengan sasaran dan indikator kinerja Sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Capaian Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	71.30	66.94	93.88
	Indeks Kualitas Air	55.63	67.63	121.57
	Indeks Tutupan Lahan	38.81	38.73	99.79
2. Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	0.3	0.3	100
3. Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah	4.17	6.78	162.58

DLH Kota Bogor tahun 2025, memiliki 11 program dengan anggaran sebesar Rp. 132.985.254.687 dengan realisasi sebesar Rp. 120.622.775.789 atau 90,70% dari anggaran.

Berikut adalah tabel capaian target dan realisasi anggaran DLH Kota Bogor tahun 2025.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan DLH Tahun Anggaran 2025

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			11.278.784.682	10.352.188.897	91,78
		Pengembangan Sistem dan		11.278.784.682	10.352.188.897	91,78

		Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	289.039.600	251.067.390	86,86
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.236.448.382	1.199.104.977	96,98
			Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	255.658.900	238.390.610	93,25
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	9.497.637.800	8.663.625.920	91,22
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			105.139.322.049	95.699.965.959	91,02
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		124.000.000	121.926.300	98,33
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.000.000	121.926.300	98,33
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33.724.763.784	31.967.822.703	94,79
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.614.843.784	31.857.902.703	94,77
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	109.920.000	109.920.000	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.065.098.390	977.304.714	91,75
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	459.272.000	452.907.800	98,61
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.952.800	74.471.425	91,99
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	329.840.000	278.352.000	84,39
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.539.590	63.455.910	91,25
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.494.000	108.117.579	86,15
		Penyediaan Jasa Penunjang		44.031.157.139	41.548.618.673	94,36

		Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	372.725.100	331.305.999	88,89
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.658.432.039	41.217.312.674	94,41
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		26.194.302.736	21.084.293.569	80,49
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.022.151.531	20.934.564.875	80,45
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.352.398	69.144.844	88,25
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.798.807	80.583.850	85,91
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			216.214.400	201.479.701	93,19
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		216.214.400	201.479.701	93,19
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	216.214.400	201.479.701	93,19
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			1.138.400.146	1.120.521.050	98,43
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1.038.845.730	1.025.394.050	98,70
			Koordinasi, Sinkronisasi dan	895.651.830	886.581.100	98,99

			Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	143.193.900	138.812.950	96,94
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		99.554.416	95.127.000	95,55
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	99.554.416	95.127.000	95,55
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			57.027.100	52.809.100	92,60
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		57.027.100	52.809.100	92,60
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	57.027.100	52.809.100	92,60
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			153.354.100	147.050.450	95,89
		Penyimpanan Sementara Limbah B3		153.354.100	147.050.450	95,89
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	153.354.100	147.050.450	95,89
7	Program			169.869.100	154.239.600	90,80

	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		169.869.100	154.239.600	90,80
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	169.869.100	154.239.600	90,80
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			1.408.801.330	1.286.158.539	91,30
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.408.801.330	1.286.158.539	91,30
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	4.536.960	3.856.800	85,01

			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup	947.885.170	852.677.396	89,96
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	456.379.200	429.624.343	94,14
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			494.366.900	489.232.600	98,96
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		494.366.900	489.232.600	98,96
			Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	494.366.900	489.232.600	98,96
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			29.878.200	24.610.600	82,37
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		29.878.200	24.610.600	82,37
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	29.878.200	24.610.600	82,37
11	Program Pengelolaan Persampahan			12.899.236.680	11.094.519.293	86,00
		Pengelolaan Sampah		12.899.236.680	11.094.519.293	86,00
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	9.024.509.800	7.676.554.911	85,06

			TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
			Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	1.025.635.800	783.507.082	76,39
			Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	2.849.091.080	2.634.457.300	92,47
JUMLAH				132.985.254.687	120.622.775.789	90,70

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program	Indikator	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
PROGRAM 2.11.06 : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	34	38	39	30	39	58	88.82	102.63	148.72
PROGRAM 2.11.10 : PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
PROGRAM : 2.11.03 : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	36.17	37.17	38.17	51.39	46.67	50.89	142.07	125.56	133.32
	Indeks Kualitas Udara	79.63	79.72	79.81	98.36	95.92	86.51	123.52	120.32	108.39
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7.11	7.72	7.98	7.98	7.72	8.22	112.23	100.00	103.01

PROGRAM 2.11.05 : PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	50	60	70	60	65	70	120	108.33	100.00
PROGRAM 2.11.03 : PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	30	40	50	31.49	50	52.48	104.97	125.00	104.96
PROGRAM 2.11.09 : PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Adiwiyata (%)	35	36	38	35.41	35.56	38	101.17	98.78	100.00
	Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan	7,94	9.26	10.59	16.8	18.98	22.18	211.58	204.97	209.44

PROGRAM 2.11.04 : PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	100	100.00	100.00
	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	77	77.5	78	81.35	79.08	81.4	105.65	102.04	104.36
	Persentase Reduksi Sampah	6,80	7	7.2	7.8	7.81	7.93	114.7	111.57	110.14
PROGRAM 1.03.04 : PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	100	100.00	100.00
	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS - 3R yang direhabilitasi	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	100	100.00	100.00
	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS - 3R yang ditingkatkan	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
	Persentase Sarana Persampahan yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00

PROGRAM 2.11.11 : PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Reduksi Sampah (%)	6,80	7	7.2	7.8	7.81	7.93	114.7	111.57	110.14
	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	77	77.5	78	81.35	79.08	81.4	105.65	102.04	104.36
	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48.8	48.8	48.8	48.8	48.8	73.75	100	100.00	151.13
	Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	2.1	2.1	2.1	2.1	2.9	2.96	100	138.10	140.95
	Indikator Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (nilai)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Nilai PMPRB di Lingkungan Perangkat daerah	81.01	81	82	NA	82.6	82	NA	101.98	100

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah	3.35	3.4	3.5	3.4	3.5	3.61	101.49	102.941	103.143
	Tujuan : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
	Sasaran : Presentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00

PROGRAM 2.11.02 : PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------

Dari table 2.1 diatas dapat terlihat capaian realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025.

a. Faktor-faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan :



Penghitungan IKA dilakukan dengan pekerjaan Pengujian dan Analisa Kualitas Air Sungai dan Situ Musim Penghujan dan Pengujian dan Analisa Kualitas Air Sungai dan Situ Musim Kemarau. Pengujian air sungai dan situ musim penghujan dan musim kemarau dilakukan masing-masing di 30 titik sampling sungai dan 9 titik sampling situ. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional untuk Air Sungai dan Sejenisnya Kelas 2.

Penentuan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor Tahun 2025 ini dilakukan dengan metode Indeks pencemar atau IP dengan menggunakan 8 (delapan) parameter, yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nigrat, Total Fosfat dan Fecal Coliform (Permen LHK No. 27 Tahun 2021) dari lokasi hulu, Tengah dan hilir pada 10 (sepuluh) lokasi pemantauan (3 (tiga) sungai dan 7 (tujuh) anak sungai) di Kota Bogor. Nilai IP tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam IKA dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku kreteria mutu air Sungai Kelas II berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, nilai IKA-INA Situ Kota Bogor Tahun 2025 ini yaitu sebesar 69,93 atau masuk dalam kriteria Sedang. IKA-INA Situ ini merupakan nilai yang diperoleh dari pemantauan air situ yang ditentukan dari 8 parameter yaitu pH, BOD, COD, DO, TSS, Nitrat, Total Posfat dan Fecal Coliform.

Kemudian gabungan nilai IKA-INA Sungai dan Situ Tahun 2025 diperoleh sebesar 66,91 atau masuk dalam kriteria Sedang. Sedangkan nilai IKA-INA sementara gabungan dengan pemantauan oleh pemerintah pusat dihasilkan 66,94. Secara keseluruhan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebagian besar kualitas air Sungai dan Situ di Kota Bogor masih berada pada kategori Sedang hinga Baik. Nilai ini

meningkat dibandingkan dengan Tahun 2024 (data Musim Penghujan dan Musim Kemarau Kota Bogor) yaitu sebesar 49,74 atau masuk dalam kriteria Kurang, dan nilai IKA gabungan pemantauan dengan pemerintah pusat sebesar 50,89.

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Penghitungan IKU tahun 2025 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, selain ditambahkan parameter PM_{2,5}, juga ada perbedaan dalam cara penghitungannya dan berbeda pula baku mutu tahunannya.

Hasil penghitungan IKU Kota Bogor sebesar 74,82 termasuk kategori baik. Sedangkan hasil penghitungan gabungan dengan pemantauan oleh Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup, diperoleh nilai sementara sebesar 67,63 termasuk kategori sedang.

Limbah asap pabrik dan industri juga merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industri tersebut berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta dapat mengakibatkan pencemaran udara, air dan tanah. Selain itu, aktivitas rumah tangga juga memiliki andil yang tinggi dalam menyumbang pencemaran udara. Kegiatan rumah tangga tersebut seperti pembakaran sampah sembarangan.

Tahun 2025 pembinaan proklam dilakukan di 6 (enam) lokasi yaitu Kelurahan Cilendek Timur dan Cilender Barat Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan dan Kewlurahan Kedungjaya Kecamatan Tanah Sareal. Dari 6 (enam) lokasi binaan proklam hanya tiga yang di daftarkan ke SRN KLHK karena ketiga lokasi binaan ini sudah memenuhi kualifikasi dari Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan.



b. Faktor - faktor penghambat pemenuhan target kinerja program/kegiatan yaitu :

- Masih rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Terbatasnya luasan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan kan berlangsungnya proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
- Semakin meningkatnya jumlah usaha / kegiatan yang berpotensi mencemari / merusak lingkungan sehingga menjadi tantangan bagi Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor untuk pemantauan dan pengawasan LH.
- Terkait tantangan bidang persampahan, dimasa datang permasalahannya akan semakin berat dengan meningkatnya jumlah penduduk yang akan berdampak pada timbulan sampah, kualitas dan kuantitas alat angkut sampah yang belum optimal.

Adapun peluang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu adalah :

1. Adanya koordinasi antar OPD lain di tingkat daerah, provinsi maupun nasional;
2. Adanya dana DAK bidang LH atau Banku Provinsi Jawa Barat yang dapat mendorong kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor;
3. Kepedulian dan keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana corporate social Responsibility (CSR);
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5. Isu lingkungan merupakan isu global sehingga pelaku usaha dituntut untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Tabel 2.4. (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perubahan Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

NO					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	-				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun		0,01	0,01	0,01	100	4,17		
						Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi		0,02	0,02	0,02	100	2,13		
						Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang		100	100	100	100	98,16		

						ditingkatkan									
						Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi		100	100	100	100	100			
						Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	66.67								
1	03	04	201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	98.62	100	100	100	100	100			
1	03	04	201	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		3320	3850	3300	85,71				
						Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun						541,76 Ton			
1	03	04	201	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi		20	10	10	100				
					Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	40					10			
1	03	04	201	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		337658	337658	321580	95,23				
						Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	557					546,50 Ton/hari			
1	03	04	201	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan		200	150	145	96,67	130			
					Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	1240								

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	100	100	100	100	1		
2	11	02	201		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100	100	100	1		
2	11	02	201	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		1	1	1	100	1		
						Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	1							
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	1	1	1	1		
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	0							
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air		46,67	38,17	46,67	122,26	46,68		
						Indeks kualitas Udara		95,92	79,81	95,92	120,18	95,93		
						Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		7,72	7,98	7,72	96,74	7,72		
						Persentase jumlah parameter kualitas air yang memenuhi baku	70.09							

[illegible]

2	11	03	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		2	2	2	100	2		
2	11	03	201	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1	1	1	100	1		
					Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK	1							
					Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	3							
2	11	03	203		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	1	1	1	1	100	1		
2	11	03	203	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		1	1	1	100	1		
						Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi di Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	1							

2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)		0,5	0,5	0,5	100	0,5		
2	11	04	201		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi		0,3	0,3	0,3	100	0,3		
2	11	04	201	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		1	1	1	100	1		
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3		30	70	65	92,85	70		
						Persentase Limbah B3 yang terkelola	82							
2	11	05	201		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3		30	70	60	85,71	70		
						Jumlah Rincian Teknis B3 yang dikeluarkan	20							
2	11	05	201	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		1	1	1	100	1		

					Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	24								
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		58	57,14	39	40	102,56	38			
2	11	06	201		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		38	102	156	147	94,23	149			
2	11	06	201	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	8	1	1	1	100	1			
2	11	06	201	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100	1			
					Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40								

					Hidup									
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha		40,38	50	31,49	62,98	40		
						Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/keg iatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	17.30							
2	11	08	201		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan		90	90	94	104,44	90		
						Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	60							
						Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	26	20	30	40	133,33	30		
2	11	08	201	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	30	10	10	10	100	10		

2	11	08	201	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		10	50	50	100	50		
2	11	08	201	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	300	782	250	300	120	200		
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan		18,98	10,59	18,98	179,22	9,26		
						Persentase sekolah Adiwiyata (%)		35,56	38	35,56	93,57	35		
						Persentase partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	22.22							
2	11	09	201		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT/Masyarakat/Lemabaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	784	782	300	782	260,67	300		
2	11	09	201	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5	18	16	24	150	16		

2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100		
2	11	10	201		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100		
						Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/dikelola	58.33							
2	11	10	201	01	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani		1	1	1	100	1		
					Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	7							
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Reduksi Sampah (%)		7,81	7,20	7,81	108,47	6,8		
						Persentase Volume sampah terangkut ke TPA		79,03	78	79,03	101,32	77,5		

						Persentase Jalur Wilayah Penyapuan		48,80	48,8	48,8	100	48,8		
						Persentase peningkatan retribusi persampahan		6,96	2,1	2,8	133,33	2,1		
						Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	67.13							
2	11	11	201		Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola di TPS 3R	57	100	100	100	100	100		
						Persentase Pengelolaan Sampah an Organik yang dikelola di Bank Sampah	92	59	50	55	110	50		
						Persentase Volume sampah terangkut ke TPA		77,04	78	79,03	101,32	50		
2	11	11	201	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		3	3	2	66,67	2		
2	11	11	201	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Terlaksananya Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pemngangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota		522	530	525	99,05	526		
2	11	11	201	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarna Penanganan Sampah untuk kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir	9	7	9	8	88,89	8		

					Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	128								
					Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	5015.1								
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah		A	A	A	A	A			
						Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah		3,61	3,5	3,2	91,42	3,5			
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89.60								
						Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	96.05								
						Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	90.15								
						Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan setiap tahun	1								
2	11	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH		100	A	A	100	A			
						Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100								
						Persentase Realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	100								

						Persentase Realisasi anggaran kegiatan dilingkup perangkat daerah	94.20								
2	11	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	100	3	3	100	3			
2	11	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	100	7	7	100	7			
2	11	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		100	100	100	100	100			
						Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	94.20								
						Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100								
2	11	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	304	302	302	100	302			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1								
2	11	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	100	100	100	100	100			
2	11	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	100	5	5	100	5			
2	11	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	3	100	2	2	100	2			

						Disediakan								
2	11	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	100	2	2	100	4		
2	11	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	100	1	1	100	1		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1							
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100							
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5							
2	11	01	207		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkategori baik	100	100	100	100	100	100		
2	11	1	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	135	140	135	135	100	135		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	141							
2	11	1	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	1	1	1	100	1		

					Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi								
2	11	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	20	10	10	100	6		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBM	100							
2	11	01	207	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	13	12	10	83,33	10		
2	11	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100	100		
2	11	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100	12		
2	11	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terlihat dalam tabel T-C.2.3 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan dukungan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaa administrasi dibidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Penyelenggaraan urusan umum, keuangan, dan penyusunan rencana Kegiatan;
- b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota Bogor;
- c. Melaksanakan inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan;
- d. Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kota Bogor;
- e. Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kota Bogor;
- f. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk kelembagaan kemasyarakatan Daerah kota Bogor;
- g. Pemberian penghargaan lingkungan hidup daerah kota Bogor;
- h. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penyelesaian pengaduan; dan
- j. pengelolaan sampah.

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKK	Target Renstra PD	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
			2025	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program 1 : Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	100	
2	Program 2 : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	20	48,75	
		Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	8	8,9	
3	Program 3 : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	100	100	
4	Program 4 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	58.32	58.33	
5	Program 5 : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat/ Lembaga/ kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	15	24.73	
6	Program 6 : Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan (%)	19	20,08	

		Persentase sekolah Adiwiyata (%)	35,60	36,86	
7	Program 7 : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	100	100	
8	Program 8 : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	4,17	4,25	
		Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS - 3R yang direhabilitasi	2,13	3,1	
		Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS - 3R yang ditingkatkan	98,16	98,48	
		Persentase Sarana Persampahan yang terpenuhi	100	100	
9	Program 9 : Pengelolaan Persampahan	Persentase Reduksi Sampah	8	8,21	
		Persentase Volume Sampah Tertangani	79,25	79,76	
		Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	94,97	96,05	
		Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	2,9	13,5	
10	Program 10 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	27,01	27,6	
		Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	26,55	26,4	
		Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	12,48	13,35	

		Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	21,97	22,25	
		Presentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	100	
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	100	
		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94	70,65	
		Persentase Kepatuhan Anggaran	100	100	
		Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95	90,7	
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94		
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11	88,13	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	88,75	92,81	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38	95,31	

		Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38	87,81	
--	--	--	-------	-------	--

Berdasarkan tabel 2.4 evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2025 yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra tahun 2025-2026, dapat disimpulkan bahwa 11 (sebelas) indikator kinerja program telah tercapai targetnya semua

Tabel 2.6. Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 sampai tahun 2029

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Catatan Analisis
			2026 (thn n)	2027 (thn n+1)	2028 (thn n+2)	2029 (thn n+3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program 1 : Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	40	60	-	80	
2	Program 2 : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	70.09	70.12	70.21	70.4	
		Persentase jumlah Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	76.67	77.78	78.89	80	
		Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,02	0,03	0,04	0.05	
3	Program 3 : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	82	83	84	85	
4	Program 4 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	58.45	58.58	59.71	60.84	

5	Program 5 : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	17.30	17.35	17.40	17.60	
6	Program 6 : Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	22.22	22.24	22.26	22.30	
7	Program 7 : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	
8	Program 8 : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	66.67	75	75.26	83.25	
9	Program 9 : Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola di TPS- 3R dan Bank Sampah	67.13	67.23	67.33	67.44	
10	Program 10 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP di lingkup perangkat daerah	89.60	89.65	89,70	89,75	
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	96.05	96.10	96.15	96.20	
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	90.15	90.25	90.35	90.40	
		Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan setiap tahun	1	1	1	1	

Tabel 2.7
Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2025	
		Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Air	71.30	66.94
2	Indeks Kualitas Udara	55.63	67.63
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	38.81	38.73
4	Persentase Cakupan layanan pengelolaan sampah	4.17	6.78
5	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	0.3	0.3

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detil bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah.

Dengan terbitnya UU tersebut tidak banyak terjadi perubahan terhadap pembagian urusan antara Pemerintah yang berimplikasi terhadap perubahan sub-sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota. Oleh karenanya, dari sisi kewenangan tidak terjadi perubahan yang sangat drastis terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan bidang lingkungan hidup dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH akan dipaparkan berdasarkan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sesuai dengan Perwali nomor 162 tahun 2021.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, serta UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini publik yang harus segera dicari penyelesaiannya. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro. Isu-isu yang berkembang di masyarakat harus didukung oleh data-data yang valid, sehingga bukan isu yang tanpa dasar.

Strategis merupakan hal sangat penting, mendasar dan prioritas yang menghasilkan efek tertentu dan sangat menentukan kondisi selanjutnya.

Isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan. Antisipasi terhadap kondisi ini pada masa depan adalah dengan melakukan berbagai tindakan yang tepat serta menjalankan aturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Isu lainnya adalah mengatasi semakin meningkatnya pencemaran lingkungan dan pemanasan suhu udara akibat polusi yang ditimbulkan oleh semakin meningkatnya kendaraan bermotor dan proporsi ruang terbangun. Oleh karena itu diperlukan integrasi dengan tantangan transportasi dan tata ruang yang ramah lingkungan.

Adapun permasalahan mendesak yang harus segera ditangani terkait dengan kondisi lingkungan di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah yang belum terpadu

Permasalahan yang terjadi adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya di kota-kota besar, permasalahan yang timbul terutama karena

- a. Besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi

- b. Keterbatasan untuk pembuangan akhir sampah, sampai saat ini Kota Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) masih terletak di Kabupaten Bogor.
- c. Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta bau yang tidak sedap, Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industri.

Secara umum, peningkatan pelayanan sampah di Kota Bogor didukung oleh peningkatan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah dan disertai peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

2. Masalah Pencemaran Air

a. Pencemaran Air Tanah

Air tanah atau air bawah permukaan, berdasarkan letak, sifat dan kondisinya fisiknya dapat dikelompokkan ke dalam air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal terdapat pada akuifer dan pada bagian atasnya tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Air tanah dalam dijumpai pada sumur-sumur bor. Kedalaman permukaan air tanah sangat ditentukan oleh topografi setempat, yaitu pada tempat bertopografi rendah, dan pada tempat dengan topografi tinggi.

b. Pencemaran Air Permukaan

Air permukaan adalah badan air yang terbuka yang dapat berupa sungai atau situ. Sumber pencemaran terhadap air permukaan di Kota Bogor terutama adalah pabrik, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, dan rumah tangga yang membuang limbahnya langsung ke badan air. Limbah tersebut dapat menurunkan kualitas fisik, kimia dan biologis air sungai atau situ.

Hasil pemantauan parameter pencemaran di bagian hilir, tengah dan hulu sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung beserta anak-anak sungainya dimana masih ada yang menunjukkan bahwa kandungan BOD, COD, kekeruhan dan coli tinja pada titik pemantauan relative tinggi. Demikian juga hasil pengukuran pada inlet dan outlet Situ Gede dan Situ Panjang. Kandungan coli tinja

yang tinggi menyebabkan badan air tersebut tidak layak untuk keperluan rumah tangga, terutama mandi dan mencuci bahan makanan.

3. Masalah Pencemaran Udara dan Kebisingan

Pencemaran udara dapat berupa meningkatnya kandungan debu, polutan atau timbulnya bau yang tidak sedap di udara. Debu timbul dari aktivitas transportasi dan kegiatan pembangunan fisik yang menimbulkan penimbunan, pembongkaran bangunan. Pencemaran udara akibat debu sifatnya fluktuatif, dan intensitasnya tinggi terutama pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan relative rendah karena partikel debu akan larut oleh air hujan.

Polutan udara umumnya bersumber dari sisa pembakaran sumber energi dalam aktifitas permukiman, transportasi dan industri. Polutan yang banyak menjadi masalah dari aktivitas terutama adalah CO, Timbal (Pb), Hidrokarbon, SO₂, H₂S dan NH₃.

Sumber utama pencemaran udara dan kebisingan di Kota Bogor adalah aktivitas transportasi. Tingginya arus transportasi terutama angkutan umum telah menimbulkan pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. Berdasarkan uji pemantauan di beberapa lokasi sample menunjukkan bahwa peningkatan kandungan NO₂ pada beberapa lokasi telah melampaui baku mutu lingkungan. Demikian juga untuk senyawa lain seperti CO dan Hidrokarbon.

Berdasarkan hasil pemantauan selama tiga tahun terakhir tingkat kebisingan yang terjadi di Kota Bogor disebabkan oleh aktivitas transportasi dan industri.

4. Pencegahan Dampak Lingkungan

Upaya untuk meminimalkan dampak yang terjadi serta menghindari penurunan kualitas lingkungan maka upaya preventif harus dilakukan mengingat perbaikan lingkungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Upaya pencegahan dimulai dari awal aktivitas antara lain: Rencana Pembangunan di Kota Bogor diharuskan dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa: AMDAL, UPL-UKL, SPPL yang dapat membantu Pemda dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi bahan acuan

pengawasan. Pemantauan dan pengawasan dari pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dilakukan setiap tahun untuk kegiatan atau usaha dan dituangkan dalam monitoring dan evaluasi.

Mengacu Pasal 22 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal/UKL/UPL. Amdal merupakan bagian dari sistem perencanaan, Amdal/UKL/UPL seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan dan gambaran yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan timbul oleh sebuah kegiatan.

5. Pengendalian Perubahan Iklim

Perubahan iklim. Melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional bahwa pemerintah kabupaten/kota diwajibkan menyusun Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK). Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk menyusun laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) setiap setahun sekali. Dokumen Inventarisasi GRK menjadi data dasar sekaligus jembatan menuju penyusunan mitigasi yang ideal dan holistik. Rangkaian penyediaan data dasar ilmiah menjadi syarat utama mitigasi GRK berkelanjutan menuju capaian SDGs 13 tentang perubahan iklim. Kota Bogor telah melaksanakan penyusunan inventarisasi GRK secara kontinyu sejak 2013. Penyusunan dokumen inventarisasi GRK Kota Bogor bertujuan untuk melakukan estimasi ulang terhadap perubahan emisi tahunan. Estimasi tersebut akan berperan sebagai pembaharuan data GRK sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program-program untuk menekan rasio peningkatan GRK Kota Bogor. Penyusunan dokumen ini sekaligus

dapat berperan sebagai dasar mitigasi maupun pendekatan penyempurnaan mitigasi yang telah ada bagi upaya pengendalian emisi GRK pada tahap berikutnya.

6. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih sulit merealisasikan penyediaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan RTH. minimnya RTH di Kota Bogor dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pembelian tanah atau land banking. Apalagi, harga tanah di perkotaan relatif lebih mahal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup telah sesuai dengan Program/Kegiatan yang ada di RPJMD Kota Bogor tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026;
2. Hasil analisa kebutuhan untuk tahun 2026 telah menggunakan Kepmendagri nomer 050-3708 tahun 2026 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Setelah dilakukan pemetaan terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 semua kegiatan telah terdefiniskan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur nya.

Tabel 2.8. (T-C. 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kota Bogor	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	66,67%	9.226.606.538	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kota Bogor	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	66,67%	7.915.840.789	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di	Kota Bogor	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana	98,62%	9.226.606.538	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di	Kota Bogor	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana	98,62%	7.915.840.789	

	Daerah Kabupaten/Kota		persampahan			Daerah Kabupaten/Kota		persampahan			
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS- 3R/ TPS yang dibangun	547,18 Ton/Hari	-	Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	547,18 Ton/Hari		
2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS- 3R/ TPS yang ditingkatkan	557 Ton/hari	1.375.314.907	Peningkatan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	557 Ton/hari	1.198.843.7.35	
3	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS- 3R/ TPS yang dioptimalisasi	40 Unit	200.000.000	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	40 Unit	169.999.800	
4	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS- 3R/ TPS yang di sediakan	1240 Unit	7.651.291.631	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	1240 Unit	6.546.997.254	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					

	LINGKUNGAN HIDUP					LINGKUNGAN HIDUP					
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	40%	420.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	40%	420.000.000	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	1 Dokumen	420.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	1 Dokumen	420.000.000	
5	Peninjauan kembali terhadap RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	420.000.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	420.000.000	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Kota Bogor	Persentase jumlah parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	70,09%	1.439.999.616	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Kota Bogor	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	70,09%	1.439.999.616	

	HIDUP					HIDUP					
		Kota Bogor	Persentase jumlah parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu	76,67%			Kota Bogor	Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	76,67%		
			Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,02%				Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,02%		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Air, Sungai dan Situ	39 Titik	1.439.999.616	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Air, Sungai dan Situ	39 Titik	1.439.999.616	
		Kota Bogor	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	10 Titik			Kota Bogor	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	10 Titik		
		Kota Bogor	Jumlah Pembinaan kampung iklim	10 Lokasi			Kota Bogor	Jumlah Pembinaan kampung iklim	10 Lokasi		

			kota Bogor					kota Bogor			
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota Bogor	Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut yang dipantau	2 Dokumen	900.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	900.000.000	
7	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK	1 Dokumen	149.999.900	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	149.999.900	
8	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	1 Dokumen	140.000.000	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah		Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	1 Dokumen	140.000.000	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	1 Laporan	249.999.716	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	1 Laporan	249.999.716	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	249.999.716	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	249.999.716	
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kota Bogor	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	82%	168.988.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kota Bogor	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	82%	168.988.000	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Persentase Jumlah Rincian Teknis B3 yang dikeluarkan	20%	168.988.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Persentase Jumlah Rincian Teknis B3 yang dikeluarkan	20%	168.988.000	
10	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	24 Laporan	168.988.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan	24 Laporan	168.988.000	

								Limbah B3			
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Bogor	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	58,45%	303.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Bogor	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	58,45%	303.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah laporan dari usaha dan atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah Kab/Kota	38%	303.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah laporan dari usaha dan atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah Kab/Kota	38%	303.000.000	

11	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Bogor	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	8 Dokumen	103.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Bogor	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	8 Dokumen	103.000.000	
12	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40 Badan/Usaha	200.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40 Badan/Usaha	200.000.000	
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	Kota Bogor	Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam	17,30%	800.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	Kota Bogor	Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam	17,30%	800.000.000	

	HIDUP UNTUK MASYARAKAT		pengelolaan Lingkungan Hidup			HIDUP UNTUK MASYARAKAT		pengelolaan Lingkungan Hidup			
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	60 Pelaku kegiatan/ usaha	800.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	60 Pelaku kegiatan / usaha	800.000.000	
			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	26 Lembaga				Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	26 Lembaga		
13	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	300 Orang	300.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	300 Orang	300.000.000	

14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	30 Lembaga	500.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	30 Lembaga	500.000.000	
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Bogor	Persentase partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	22.22%	550.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Bogor	Persentase Sekolah Adiwiyata (%)	22.22%	550.000.000	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah / Kelompok Masyarakat	550.000.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah / Kelompok Masyarakat	550.000.000	

15	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	550.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	550.000.000	
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100%	50.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100%	50.000.000	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada	58,33%	50.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada	58,33%	50.000.000	

			dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti					dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti			
16	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	7 Pengaduan	50.000.000	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	7 Pengaduan	50.000.000	
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Bogor	Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	67,13%	18.204.371.100	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Bogor	Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	67,13%	18.204.371.100	
	Pengelolaan Sampah	Kota Bogor	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R dan Bank Sampah	57 %	18.204.371.100	Pengelolaan Sampah	Kota Bogor	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	57 %	18.204.371.100	
			Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	92%				Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	92%		

17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9 unit	14.402.788.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9 unit	14.402.788.000	
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	5015,1 Ton	952.468.800	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	5015,1 Ton	952.468.800	
19	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Kota Bogor	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	128 unit	2.849.114.300	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Kota Bogor	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	128 unit	2.849.114.300	
XI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bogor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89,60 Nilai	108.982.581.239	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89,60 Nilai	108.982.581.239	
			Tingkat Kepatuhan	96.05%				Tingkat Kepatuhan	96.05%		

			Pengelolaan Keuangan					Pengelolaan Keuangan			
			Nilai Survey Kepuasan	90.15 Nilai				Nilai Survey Kepuasan	90.15 Nilai		
			Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan	1 inovasi/ tahun				Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan	1 Inovasi/ tahun		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100%	119.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100%	119.000.000	
			Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun	100%				Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun	100%		
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	119.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	119.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	100%	31.885.400.373	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	100%	31.885.400.373	
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/Bulan	31.775.480.373	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/Bulan	31.775.480.373	

22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	109.920.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	109.920.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.315.845.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.315.845.700	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	448.539.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	448.539.300	
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	89.980.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	89.980.000	
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	360.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	360.000.000	

26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	113.182.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	113.182.400	
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	304.144.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	304.144.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	673.883.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	673.883.100	
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	673.883.100	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	673.883.100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	47.812.487.030	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	47.812.487.030	

29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	399.261.854	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	399.261.854	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	47.413.225.176	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.962.801.95	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	27.175.965.036	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	27.175.965.036	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	26.818.929.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	24.491.768.400	
32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha	141 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire	141 Unit	351.404.663	

			bilitasi					habilitasi			
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	207.035.336	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	79.459.663	
			JUMLAH		140.145.546.493	JUMLAH				122.970.054.406	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Kegiatan yang merupakan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang masuk forum Musreimbang baik tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2026 terdapat dalam tabel T-C.32

Usulan-usulan tersebut telah sesuai dengan isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup yaitu adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dalam hal ini terkait dengan pengelolaan persampahan.

Tabel 2.9. (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kota Bogor Jawa Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	POKIR				
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota				

	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	RT 01,02,03 RW 01 Kelurahan Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat		3 unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 02 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 04 Kelurahan Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 03 RW 07 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 12 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 03 RW 08 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01,02,03,04 RW 06 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur		8 Unit	Tempat Sampah
		RT 01 RW 12, 08, 01, 03,04,05,06,09,10,11 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat		10 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 03 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 02 RW 02 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal		1 Unit	
		RT 01 RW 04 Kelurahan Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 04 RW 04 Kelurahan Balumbangjaya Kecamatan Bogor Barat		5 Unit	
		RT 01 RW 10 Kelurahan Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah		2 Unit	Gerobak Sampah

		RT 04 RW 01 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 06 Kelurahan Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 06 RW 03 Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 04 RW 01 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal		1 Unit	Bak Sampah
		RT 01 RW 02 Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah		1 Buah	
		RT 03 RW 04 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 05 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 02 RW 10 Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 02 RW 02 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal		1 Unit	
		RT 01 RW 08 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan		3 Unit	
		RT 01 RW 09 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara		5 Buah	
		RT 05 RW 03 Kelurahan Tegal gundil Kecamatan Bogor Utara		1 Unit	
		RT 04 RW 09 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara		1 Unit	
		RT 02 RW 04 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor		2 Unit	Gerobak Sampah

		Timur			
		RT 05 RW 10 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur		1 bangunan konstruksi	
		RT 01 RW 05 Kelurahan Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 01 Kelurahan Kebon Kalapa Kecamatan Bogor Tengah		300 Orang	
		RT 01 RW 11 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan		2 Unit	
		RT 01 RW 07 Kelurahan Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat		1 Unit	Gerobak Sampah
		RT 01 RW 10 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara		10 Buah	
	MUSRENBANG				
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota				
	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Cilubang Situgede Bogor Barat		1 unit	Gerobak
		Kelurahan Loji Jl Siaga Komp Pertanian Loji No. 49 Bogor Barat		1 unit	Gerobak
		RW 001 Jalan RE. Abdullah Gang Buntu III Bogor Barat		1 unit	Dropbox
		RW 10 Cilendek Barat Cemplang Baru RW 10 Bogor Barat		1 Buah	Dropbox
		Jl Mawar Kelurahan Sindangrasa		2 Paket	Tempat Sampah Terpilah

	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	TPS Griya Katulampa		1 Paket	TPS
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pabaton Bogor Tengah		1 Paket	Sosialisasi
		Kedunghalang Poncol Sukaresmi Tanah Sareal		1 Paket	Sosialisasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2026 adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen Renja ini memuat informasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, meliputi program kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan rencana tingkat capaian (target) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2026. Program dan kegiatan yang disasar tersebut tidak lepas dari kerangka kebijakan nasional sehingga perlu untuk menelaahnya dan menyesuaikan dengan kebijakan baik tingkat nasional maupun provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kota Bogor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Bogor yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan daerah harus sejalan dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional maka diperlukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi.

Dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”*. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

- a. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

- b. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- e. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- g. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- h. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 akan mengacu pada prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, arahan Presiden, dan visi misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan dalam RPJMD 2025-2029. RKDP 2026 juga akan menjadi dasar penyusunan APBN 2026 dan pelaksanaan pembangunan nasional. RKP 2026 harus selaras dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan, termasuk kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

Tema Pembangunan Jawa Barat tahun 2026 adalah *"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"*. Tema ini sejalan dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2026.

Tema ini juga sejalan dengan visi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 yaitu *"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"* dan visi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 yaitu *"NKRI yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"*

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan pada 11 sub bidang yaitu :

Tabel 3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

K.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi.	RPPLH kabupaten/kota.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk KRP provinsi.	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
			Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11.	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (<i>landfill gas</i>) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.		pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis.

Visi Misi RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 adalah :
Bogor Beres – Bogor maju.

Misinya adalah :
Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera dan Bogor Lancar.

Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Strategi merupakan aturan atau arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang dapat meliputi kegiatan atau program secara keseluruhan. Strategi dibangun melalui pemanfaatan semua kekuatan (sumberdaya) dan peluang secara optimal serta memperhatikan semua kelemahan dan ancaman sebagai bahan koreksi. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dengan memanfaatkan semua kelebihan dan meminimumkan kelemahan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Tabel berikut menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Berikut indikator sasaran, dan target kinerja sasaran untuk 2 tahun ke depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, sehingga bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH TAHUN 2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2026
Sasaran RPJMD 1 : Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan			IK Sasaran RPJMD 1 : Indeks Kualitas Air	Poin	71.50
			IK Sasaran RPJMD 2 : Indeks Kualitas Udara	Poin	56.03
			IK Sasaran RPJMD 3 : Indeks Kualitas Lahan	Poin	38.88
	Tujuan Renstra : Terwujudnya Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup		IK Tujuan 1 : Indeks Kualitas Air	Poin	71.50
			IK Tujuan 2 : Indeks Kualitas Udara	Poin	56.03
			IK Tujuan 3 : Indeks Kualitas Lahan	Poin	38.88

		Sasaran Renstra 1 : Terkendalnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	IK Sasaran : Persentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	Persentase	79.16
			IK Sasaran : Persentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Persentase	88
			IK Sasaran : Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	Ha	1
Sasaran RPJMD 2: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca			IK Sasaran RPJMD: Penurunan emisi GRK Kumulatif (Ton CO2Eq)	Persentase	3.62
			IK Tujuan 4 : Persentase sampah terkelola	Persentase	94.13
		Sasaran Renstra 2 : Meningkatnya Reduksi Sampah di Sumber	IK Sasaran : Persentase timbulan sampah terdaur ulang	Persentase	22.68
			IK Sasaran : Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase	72.81
		Sasaran Renstra 3 : Meningkatnya Kualitas Penanganan Sampah	IK Sasaran : Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persentase	24.59
Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			IK Sasaran RPJMD: Indeks Pelayanan Publik		

	Tujuan Renstra : Terwujudnya Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup		IK Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	86.5
		Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	Nilai	89.60
			Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Persentase	3.62
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persentase	96.05
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi/Tahun	1

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Visi pembangunan sebagaimana tertuang dalam dalam Ranwal RPJMD Kota Bogor 2025-2029 adalah:

“BOGOR BERES – BOGOR MAJU”

Yang dimaksud Bogor Beres – Bogor Maju adalah :

1. Bogor Beres : mengandung pengertian Mewujudkan peningkatan Pendidikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Bogor Maju : Mewujudkan kemajuan Kota Bogor dengan ciri khas kebudayaan dan karakter masyarakat yang kuat;

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:

1. Bogor CERDAS : Memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat, serta memberdayakan Lembaga Pendidikan formal dan non formal, selain itu juga memastikan pengelolaan pembangunan yang baik disertai dengan aparatur yang cerdas dan pelayanan public yang semakin inovatif.
2. BOGOR SEHAT : Memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia
3. BOGOR SEJAHTERA : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirasusahaan, mengembangkan industry kreatif yang inovatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. BOGOR LANCAR : Menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas public.

Berpedoman pada visi dan misi RPJMD maka dirumuskan Tujuan Pembangunan Renstra Dinas Lingkungan Kota Bogor 2025-2029 Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan
2. Meningkatnya Pelayanan Persampahan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Terkendalinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
2. Meningkatnya Reduksi Sampah
3. Meningkatnya Kualitas Pengolahan Sampah di fasilitas pengolahan sampah
4. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 1 (satu) melalui 9 (Sembilan) program yaitu : (1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (2) Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3), (3) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH, (4) Program Peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, (5) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, (6) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, (7) Program Pengelolaan Persampahan dan (8) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, (9) Program Perencanaan Lingkungan dan (10) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Setelah dilakukan pemetaan sesuai Kepmendagri Nomor 900 - 2850 Tahun 2025 maka disepakati bahwa dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2021 terdiri dari 11 program 17 kegiatan, dan 32 sub kegiatan yang telah sesuai dengan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur dalam Kepmendagri Nomor 900 - 2850 Tahun 2025.

Total Kebutuhan dana/Pagu Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 adalah sebesar Rp. 140.145.546.493,- (Seratus empat puluh milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah)

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2026 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2026 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.33:

Tabel 3.3. (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Provinsi/Kabupaten/Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	Kota Bogor	66,67%	7,915,840,789	APBD		75%	13.380.000.000
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Kota Bogor	98,62%	7,915,840,789	APBD		99%	13.380.000.000

1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	Kota Bogor	547,18 Ton/Hari	-	APBD		547,98 Ton	300.000.000
2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	Kota Bogor	557 Ton/hari	1,198,843,735	APBD		579 Ton/hari	1.300.000.000
3	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	Kota Bogor	40 Unit	169,999,800	APBD		42 Unit	280.000.000
4	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	Kota Bogor	1240 Unit	6,546,997,254	APBD		1243 Unit	11.500.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	Kota Bogor	40%	424,143,000	APBD		60%	400.000.000
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Kota Bogor	1 Dokumen	424,143,000	APBD		1 Dokumen	400.000.000
5	Peninjauan kembali terhadap RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPL Kabupaten/Kota yang dilakukan peninjauan kembali	Kota Bogor	1 Dokumen	424,143,000	APBD		1 Dokumen	400.000.000
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	Kota Bogor	70,09%	1,267,160,740	APBD		70,12%	2.000.000.000

	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
		Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	Kota Bogor	76,67%		APBD		77,78%
		Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	Kota Bogor	0,02%		APBD		0,03%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Air, Sungai dan Situ	Kota Bogor	39 Titik	1,117,621,040	APBD		39 Titik 1.750.000.000
		Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	Kota Bogor	10 Titik		APBD		10 Titik
		Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	Kota Bogor	10 Lokasi		APBD		10 Lokasi
6	Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut yang dipantau	Kota Bogor	2 Dokumen	889,961,540	APBD		2 Lokasi 1.400.000.000
7	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK	Kota Bogor	1 Dokumen	87,700,700	APBD		1 Dokumen 200.000.000
8	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	Kota Bogor	1 Dokumen	139,958,800	APBD		1 Dokumen 150.000.000
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	Kota Bogor	1 Laporan	149,539,700	APBD		1 Laporan 250.000.000

9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi di Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	Kota Bogor	1 Kegiatan	149,539,700	APBD		1 Kegiatan	250.000.000
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	Kota Bogor	82%	115,488,900	APBD		46%	300.000.000
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Jumlah Rincian Teknis B3 yang dikeluarkan	Kota Bogor	20%	115,488,900	APBD		83%	300.000.000
10	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kota Bogor	24 Laporan	115,488,900	APBD		2 Laporan	300.000.000
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Bogor	58,45%	242,234,100	APBD		58,58%	350.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Kota Bogor	38%	242,234,100	APBD		78,57%	350.000.000
11	Fasilitasi Pemenuhan	Jumlah rekomendasi	Kota	8	45,190,000	APBD		8	150.000.000

	Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Bogor	Dokumen				Dokumen	
12	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Bogor	40 Badan/ Usaha	197,044,100	APBD		44 Badan/ Usaha	200.000.000
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok Masyarakat/ Lembaga/ kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	17,30%	575,226,500	APBD		17,35%	1.100.000.000
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	Kota Bogor	60 Pelaku kegiatan/ usaha	575,226,500	APBD		45 Pelaku kegiatan/ usaha	1.100.000.000
		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup		26 Lembaga				70 Lembaga	

13	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Bogor	300 Orang	222,646,800	APBD		300 Orang	300.000.000
14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kota Bogor	30 Lembaga	352,579,700	APBD		35 Lembaga	800.000.000
VII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Adiwiyata	Kota Bogor	22.22%	550,000,000	APBD		39,16%	600.000.000
		Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan		22,24%				22,24%	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat	550,000,000	APBD		784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat	600.000.000
15	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Bogor	5 Entitas	550.000.000	APBD		5 Entitas	600.000.000
VIII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	Kota Bogor	100%	3,727,400	APBD		100%	50.000.000

	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/dikelola	Kota Bogor	58,33%		APBD		75%	50.000.000
16	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Kota Bogor	7 Pengaduan	3,727,400	APBD		9 Pengaduan	50.000.000
IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	Kota Bogor	67,13%	9,828,689,840	APBD		67,23%	13.220.000.000
	Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	Kota Bogor	57 %	9,828,689,840	APBD		58%	13.220.000.000
		Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah		92%				93%	
17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Bogor	9 unit	5,941,292,540	APBD		10 Unit	9.000.000.000
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Kota Bogor	5015,1 Ton	952,466,100	APBD		5051,6 Ton	1.220.000.000

19	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kota Bogor	128 unit	2,934,931,200	APBD		129 Unit	3.000.000.000
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Bogor	89,60 Nilai	102,047,543,137	APBD		89,60 Nilai	
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan		96.05%		APBD		95%	
		Nilai Survey Kepuasan		90.15 Nilai		APBD		3,63 Nilai	
		Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan		1 inovasi/ta hun		APBD		1 Buah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	Kota Bogor	100%	105,000,600	APBD		100%	130.000.000
		Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun		100%				100%	
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	5 Laporan	105,000,600	APBD		5 Laporan	130.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	Kota Bogor	100%	31,398,694,878	APBD		100%	34.859.920.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	Kota Bogor	100%				100%	
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	238 Orang/Bulan	31,302,274,878	APBD		225 Orang/Bulan	34.750.000.000

22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	96,420,000	APBD		1 Laporan	109.920.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Bogor	100%	833,017,110	APBD		100%	1.365.000.000
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	201,625,400	APBD		1 Paket	495.000.000
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	5 Paket	89,980,000	APBD		5 Paket	110.000.000
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	3 Paket	205,330,000	APBD		3 Paket	400.000.000
26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	79,862,400	APBD		1 Paket	110.000.000
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	256,219,310	APBD		1 Laporan	250.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Kota Bogor	100%	349,002,800	APBD		100%	300.000.000
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Bogor	5 Unit	349,002,800	APBD		5 Unit	300.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang	Kota Bogor	100%	44,439,194,907	APBD		100%	46.812.500.000

	Pemerintahan Daerah	urusan pemerintahan daerah							
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	476,392,955	APBD		12 Laporan	412.500.000
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	43,962,801,952	APBD		12 Laporan	46.400.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah ber kondisi baik	Kota Bogor	100%	24,922,632,842	APBD		100%	27.355.000.000
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	141 Unit	24,491,768,400	APBD		141 Unit	26.200.000.000
32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bogor	1 Unit	351,404,779	APBD		1 Unit	660.000.000
33	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bogor	10 Unit	79,459,663	APBD		10 Unit	495.000.000
					122,970,054,406				142.222.420.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Seluruh kegiatan yang dikembangkan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam membuat rencana program dan kegiatan ini, pada dasarnya jenis belanja yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu Belanja Tidak Langsung yang meliputi gaji dan tunjangan bagi pegawai serta Belanja Langsung yang merupakan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. Untuk membiayai kedua jenis belanja tadi, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan Dana APBD Kota Bogor.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025 yaitu :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - 1) Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - 2.1 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - 2.2 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - 2.3 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - 2.4 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 1) Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Sub Kegiatan :

- a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - b) Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - c) Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
 - 2) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
- 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3)
 - 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - Sub Kegiatan :
 - a) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH)
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan :
 - a) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - b) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - c) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota
Sub Kegiatan :
 - a) Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
9. Program Pengelolaan Persampahan
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan :
 - a) Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah
 - b) Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah
 - c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.1. Renja 2026 Dinas Lingkungan Hidup

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	Kota Bogor	66,67%	7,915,840,789	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Kota Bogor	98,62%	7,915,840,789	
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	Kota Bogor	547,18 Ton/Hari	-	
2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	Kota Bogor	557 Ton/hari	1,198,843,735	
3	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	Kota Bogor	40 Unit	169,999,800	
4	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	Kota Bogor	1240 Unit	6,546,997,254	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	Kota Bogor	40%	424,143,000	

	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Kota Bogor	1 Dokumen	424,143,000	
5	Peninjauan kembali terhadap RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPL Kabupaten/Kota yang dilakukan peninjauan kembali	Kota Bogor	1 Dokumen	424,143,000	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	Kota Bogor	70,09%	1,267,160,740	
		Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	Kota Bogor	76,67%		
		Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	Kota Bogor	0,02%		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Air, Sungai dan Situ	Kota Bogor	39 Titik	1,117,621,040	
		Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	Kota Bogor	10 Titik		
		Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	Kota Bogor	10 Lokasi		
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut yang dipantau	Kota Bogor	2 Dokumen	889,961,540	
7	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK	Kota Bogor	1 Dokumen	87,700,700	
8	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	Kota Bogor	1 Dokumen	139,958,800	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	Kota Bogor	1 Laporan	149,539,700	

9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi di Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	Kota Bogor	1 Kegiatan	149,539,700	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	Kota Bogor	82%	115,488,900	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Jumlah Rincian Teknis B3 yang dikeluarkan	Kota Bogor	20%	115,488,900	
10	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kota Bogor	24 Laporan	115,488,900	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Bogor	58,45%	242,234,100	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Kota Bogor	38%	242,234,100	
11	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Kota Bogor	8 Dokumen	45,190,000	
12	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Bogor	40 Badan/ Usaha	197,044,100	
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kelompok Masyarakat/ Lembaga/ kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	17,30%	575,226,500	

	UNTUK MASYARAKAT					
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	Kota Bogor	60 Pelaku kegiatan/usaha	575,226,500	
		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup		26 Lembaga		
13	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Bogor	300 Orang	222,646,800	
14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kota Bogor	30 Lembaga	352,579,700	
VII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Adiwiyata	Kota Bogor	22.22%	550,000,000	
		Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan		22,24%		
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat	550,000,000	
15	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Bogor	5 Entitas	550.000.000	
VIII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran /	Kota Bogor	100%	3,727,400	

		kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti				
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/dikelola	Kota Bogor	58,33%		
16	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Kota Bogor	7 Pengaduan	3,727,400	
IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	Kota Bogor	67,13%	9,828,689,840	
	Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	Kota Bogor	57 %	9,828,689,840	
		Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah		92%		
17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Bogor	9 unit	5,941,292,540	
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Kota Bogor	5015,1 Ton	952,466,100	
19	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kota Bogor	128 unit	2,934,931,200	
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Bogor	89,60 Nilai	102,047,543,137	
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan		96.05%		
		Nilai Survey Kepuasan		90.15 Nilai		

		Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan		1 inovasi/tahun		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	Kota Bogor	100%	105,000,600	
		Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun		100%		
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	5 Laporan	105,000,600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	Kota Bogor	100%	31,398,694,878	
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	Kota Bogor	100%		
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	238 Orang/Bulan	31,302,274,878	
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	96,420,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Bogor	100%	833,017,110	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	201,625,400	
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	5 Paket	89,980,000	
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	3 Paket	205,330,000	
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	79,862,400	
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	256,219,310	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Kota Bogor	100%	349,002,800	
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	Kota Bogor	5 Unit	349,002,800	

	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bogor	100%	44,439,194,907	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	476,392,955	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	43,962,801,952	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah ber kondisi baik	Kota Bogor	100%	24,922,632,842	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	141 Unit	24,491,768,400	
32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bogor	1 Unit	351,404,779	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bogor	10 Unit	79,459,663	
					122,970,054,406	

BAB V

P E N U T U P

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2026 yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun secara administrasi. Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah disusun.

Penyusunan Renja ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Diharapkan Renja ini dapat bermanfaat sebagai pedoman operasional bagi aparat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan diperlukan konsistensi dan disiplin yang kuat dari setiap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk merealisasikan Rencana Kerja ini agar terciptanya Kota Bogor yang bersih, nyaman dan berwawasan lingkungan.